

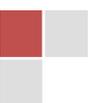
2023



LAPORAN  
AKUNTABILITAS  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH

(LAKIP)  
TA. 2022

DINAS PERIKANAN



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)

TA. 2022



BAGIAN PERENCANAAN

**DINAS PERIKANAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
TA. 2022**



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Tahun 2022 (LAKIP Dinas Perikanan 2022)" dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya dalam kaitan terselenggaranya *good governance* dan *clean government*.

LAKIP Dinas Perikanan Tahun 2022 menyajikan informasi tentang pencapaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam merealisasikan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja Dinas Perikanan Tahun 2022. LAKIP ini menjelaskan tentang pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan dari berbagai sumber anggaran baik APBD Kabupaten Luwu Timur (DAU dan DAK), APBD Provinsi Sulawesi Selatan maupun APBN, yang memiliki kaitan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas serta berdampak nyata terhadap pencapaian target indikator kinerja Kunci (IKK). Di samping itu, dalam LAKIP ini juga menguraikan tentang keselarasan antara pencapaian sasaran Renstra Dinas dan sasaran Rencana Kinerja Tahunan 2022 dengan sasaran kinerja utama RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026.

LAKIP Dinas Perikanan Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik makro maupun mikro serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan di bidang kelautan dan perikanan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan oleh banyak pihak, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan sektor perikanan secara umum di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan. Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran dan *stakeholder*



terkait lainnya, kondisi ini merupakan modal dasar yang sangat penting dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Luwu Timur sehingga bisa lebih maju dan lebih unggul, ditengah-tengah semakin tingginya tantangan dan permasalahan, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat, khususnya kepada Tim Penyusun LAKIP Dinas Perikanan Tahun 2022, yang telah berupaya bekerja keras dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas yang diamanahkan sehingga LAKIP Dinas Perikanan Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Kami menyadari LAKIP ini masih mengandung sisi kelemahan dan kekurangan, sehingga dengan hati terbuka dan ikhlas, kami senantiasa menyambut baik atas segala bentuk kritik positif serta saran konstruktif dari semua pihak dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan penyusunan LAKIP pada masa mendatang. Akhir kata, dengan mengharap ridho dan pertolongan Allah SWT, semoga LAKIP Dinas Perikanan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pembangunan disegala bidang.

Malili, 02 Januari 2023

**KEPALA DINAS**  
DINAS PERIKANAN  
**Drs. Alimuddin Nasir, M.Si**  
Pkt. Pembina Utama Muda  
Nip. 1961231 198603 1 134



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam meningkatkan pelayanan terhadap kelompok nelayan, petani tambak, dan masyarakat pesisir pada umumnya diwujudkan dengan pembentukan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur melalui Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 83 Tahun 2021. Adapun **Visi** Dinas Perikanan sejalan dengan **Visi** Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yaitu **Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya**.

Berkaitan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur, wajib melakukan pengukuran capaian kinerja berdasarkan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022. Realisasi pencapaian indikator kinerja Dinas Perikanan pada pencapaian indikator kinerja periode awal Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Tahun 2022 yang secara khusus dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama melalui pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, dapat digambarkan sebagai berikut :

### **Sasaran I : Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan**

#### **Indikator Kinerja 1 : Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan**

Indikator Kinerja Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dengan formulasi yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, yang sumber datanya berasal dari Badan Pusat Statistik, namun data untuk tahun 2022 belum terbit, sehingga data yang digunakan adalah data capaian tahun 2021.

**Sasaran ke-1:** Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan dapat terwujud seiring dengan pencapaian indikator sasaran yaitu Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dan Jumlah Produksi Perikanan dengan persentase capaian rata-rata di atas 100 persen atau kategori **sangat berhasil**.

**Sasaran ke-2 :** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dimana indikator sasaran yang ingin dicapai yaitu Nilai SAKIP, dimana



target untuk tahun 2022 adalah nilai B dan capaian yaitu nilai B, dengan kategori penilaian **sangat berhasil**.

Pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 untuk semua sasaran berikut indicator kerjanya secara umum berhasil. Ada beberapa indikator yang belum terealisasi atau masih dibawah target, namun secara keseluruhan capaian rata-rata kegiatan cukup baik atau memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka pencapaian sasaran tahun 2022 lebih baik.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam LAKIP ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP dimasa yang akan datang.

Malili, 02 Januari 2023

  
**KEPALA DINAS**  
DINAS PERIKANAN  
**Drs. Alimuddin Nasir, M.Si**  
Pkt. Pembina Utama Muda  
Nip. 1961231 198603 1 134



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	x
Daftar Diagram.....	xi
Daftar Lampiran .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Maksud, Tujuan dan Manfaat.....	2
1. Maksud .....	2
2. Tujuan .....	2
3. Manfaat.....	2
I.3 Gambaran Umum Daerah .....	3
1. Luas dan Batas Wilayah Geografis .....	3
2. Potensi Perikanan .....	3
3. Gambaran Umum Dinas Perikanan.....	10
I.4 Peran Organisasi .....	12
I.5 Isu Strategis .....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>14</b>
II.1 Perencanaan Strategis .....	14
1. Visi dan Misi .....	14
2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	15
3. Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022 (IKU RPJMD) .....	17
II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>25</b>
III.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	25
III.2 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022 .....	26
1. Capaian Kinerja Daerah (Indikator Kinerja Utama RPJMD) .....	26
2. Analisa Penyebab Peningkatan dan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	35
3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	40
4. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian .....	41
III.3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2022 .....	69
1. Realisasi Keuangan .....	69
2. Analisa Penyebab Peningkatan dan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	72
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
IV.1 Kesimpulan .....	74
IV. 2 Saran .....	75
Lampiran .....	76



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 .....	15
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Daerah (IKU RPMJD) yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 .....	17
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Eselon II .....	18
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Eselon III Sekretaris .....	18
Tabel 2.5.	Perjanjian Kerja Eselon III Bidang Perikanan Tangkap .....	19
Tabel 2.6	Perjanjian Kerja Eselon III Bidang Perikanan Budidaya .....	20
Tabel 2.7.	Perjanjian Kerja Eselon III Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan .....	20
Tabel 2.8.	Perjanjian Kerja Eselon IV Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.....	21
Tabel 2.9.	Perjanjian Kerja Eselon IV Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .....	22
Tabel 2.10.	Perjanjian Kerja Eselon IV Kepala UPTD Balai Benih Ikan .....	23
Tabel 2.11.	Anggaran Belanja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur T.A. 2022 .....	24
Tabel 3.1.	Pengukuran Perjanjian Kerja Eselon II .....	27
Tabel 3.2.	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	28
Tabel 3.3.	Perbandingan Capaian Kinerja Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (Rupiah) Tahun 2019-2022 .....	28
Tabel 3.4.	Perbandingan antara Realisasi dengan Target Renstra Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (Rupiah) Tahun 2023-2024 .....	29
Tabel 3.5.	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	30
Tabel 3.6.	Perbandingan antara Capaian Kinerja Jumlah Produksi Perikanan (Ton) Tahun 2019-2022 .....	30
Tabel 3.7.	Perbandingan antara Realisasi dengan Target Renstra Produksi Perikanan (Ton) 2023 – 2024.....	31
Tabel 3.8.	Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Provinsi dan Nasional.....	31
Tabel 3.9	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 .....	33



Tabel 3.10	Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2018-2021 .....	33
Tabel 3.11	Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020-2021 dengan Target Renstra .....	33
Tabel 3.12	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	34
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Program Tahun 2019-2022 .....	34
Tabel 3.14	Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan Target Renstra Rata-Rata Capaian Program Tahun 2023-2024 .....	35
Tabel 3.15.	Sarana dan Peralatan Kerja Utama .....	41
Tabel 3.16.	Data Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Perairan Laut dan Danau) Tahun 2022.....	42
Tabel 3.17.	Data Tambatan Perahu yang dibangun/direhab Tahun 2022 .....	44
Tabel 3.18.	Data Sarana Alat Tangkap dan Alat Bantu Usaha Perikanan Ikan yang Disediakan Tahun 2022.....	45
Tabel 3.19.	Jumlah Kelompok yang Menerima Sarana Alat Tangkap dan Alat Bantu Usaha Perikanan Tahun 2021-2022 .....	46
Tabel 3.20.	Nama Kelompok Masyarakat Pengawas yang Aktif Tahun 2022 .....	49
Tabel 3.21	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Tahun 2022 .....	50
Tabel 3.22	Data Prasarana Pembudidaya yang Dibangun Tahun 2022 .....	53
Tabel 3.23.	Panjang Jalan Produksi Tambak yang Dibangun/Ditingkatkan Tahun 2021-2022.....	54
Tabel 3.24.	Jumlah Jembatan Tambak yang Dibangun Tahun 2021-2022 .....	54
Tabel 3.25.	Jumlah Benih Unggul serta Sarana Pembudidaya Ikan yang Tersedia.....	55
Tabel 3.26.	Jumlah Kelompok yang Menerima Sarana Produksi Budidaya Ikan/Rumput Laut Tahun 2021-2022.....	57
Tabel 3.27.	Data Produksi Hasil Pengolahan Ikan Tahun 2022 .....	59
Tabel 3.28.	Kelompok Usaha Perikanan yang Dibina Tahun 2022 .....	60
Tabel 3.29.	Sarana dan Prasarana Industri Perikanan yang Dibangun/Rehab Tahun 2022 .....	61
Tabel 3.30.	Data Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Tahun 2022....	62



Tabel 3.31.	Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Perikanan Tahun 2022 .....	69
Tabel 3.32.	Target dan Realisasi Belanja Dinas Perikanan .....	70
Tabel 3.33	Realisasi Anggaran Program Berdasarkan Dokumen Perubahan .....	71



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan ..... 11



**DAFTAR DIAGRAM**

Diagram 3.1. Realisasi Capaian Kinerja Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (Rupiah) .....	29
Diagram 3.2. Realisasi Capaian Kinerja Jumlah Produksi Perikanan (Ton) .....	31
Diagram 3.3. Realisasi Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Program .....	34



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas  
Perikanan Tahun 2022
- Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan



## 1

## BAB 1 PENDAHULUAN

**I.1 LATAR BELAKANG**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) merupakan amanat dari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pada pasal 3 dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Salah satu asas dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yakni asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah berupa laporan yang diberi nama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan tersebut harus memberikan gambaran yang luas dan subyektif mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran, program, kegiatan serta indikator makro, baik pada aspek keberhasilan maupun aspek ketidakberhasilan kinerja yang telah dicapai pada periode tertentu.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014



tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maka Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur memiliki kewajiban untuk membuat dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

## **I.2 MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT**

### **1. Maksud**

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi pokok Dinas atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian target kinerja daerah yang sudah diperjanjikan.

### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur, akurat dan obyektif kepada pemberi mandat atas capaian kinerja yang telah dan seharusnya dicapai pada tahun 2022, baik yang bersifat keberhasilan maupun kegagalan.
- b. Meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas instansi serta meningkatkan pula kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah.
- c. Sebagai bahan evaluasi dan bahan perbaikan secara berkesinambungan bagi dinas untuk meningkatkan kinerja pada periode yang akan datang.

### **3. Manfaat**

Manfaat penyusunan LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah :



- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Bahan masukan bagi penyempurnaan dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja pada periode yang akan datang;
- c. Bahan penyempurnaan pengelolaan program dan kegiatan pada periode berikutnya; dan
- d. Bahan masukan dan pertimbangan pengambilan kebijakan bidang Agroindustri dan ketahanan pangan.

### **I.3 GAMBARAN UMUM DAERAH**

#### **1. Luas dan Batas Wilayah Geografis**

Kabupaten Luwu Timur memiliki luas wilayah 6.994,88 km<sup>2</sup> atau 11,14% luas Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari 11 kecamatan dan terdapat 127 Desa/Kelurahan. Secara geografis Kabupaten Luwu Timur berada di sebelah Selatan garis khatulistiwa, tepatnya terletak diantara 2°03'00" - 3°03'25" LS dan 119°28'56" - 121°47'27" BT. Sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, sebelah Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara.

#### **2. Potensi Perikanan**

Potensi dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Luwu Timur secara umum sangat besar dan menjanjikan. Jenis Komoditi yang dapat dikembangkan merupakan komoditi ekspor dengan potensi produksi skala besar. Hal ini didukung dengan ketersediaan lahan produksi yang sangat luas dan layak serta dukungan sarana dan prasarana yang sangat memadai yang terdiri dari

❖ Panjang garis pantai	:	117,4 Km
❖ Luas perairan otonomi	:	48.050 Km <sup>2</sup>
❖ Luas Tambak	:	13.832 Ha
❖ Luas Budidaya Rumput Laut	:	2.620 Ha
❖ Luas Budidaya Air Tawar	:	1.424 Ha



Potensi sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Luwu Timur secara umum mencakup Potensi Perikanan Tangkap dan Potensi Perikanan Budidaya yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur. Hal ini didukung dengan letak geografis Kabupaten Luwu timur yang terdiri dari wilayah laut dan darat dengan 9 (sembilan) sungai besar yang mengalir di wilayah Kabupaten Luwu Timur melintasi kecamatan. Sungai terpanjang yaitu Sungai Kalaena dengan panjang 85 Km dan yang terpendek Sungai Bambalu dengan panjang 15 Km. Selain itu terdapat 5 (lima) danau alami yang sangat indah dan dipertahankan kealamiannya yaitu Danau Matano (dengan luas 245,70 km<sup>2</sup>), Danau Mahalona (25 km<sup>2</sup>), Danau Towuti (585 km<sup>2</sup>), Danau Taparang Masapi (2,43 km<sup>2</sup>) dan Danau Lontoa (1,71 km<sup>2</sup>). Danau Matano terletak di Kecamatan Nuha sedangkan 4 (empat) danau lainnya tersebar di Kecamatan Towuti. berikut perkembangan Perikanan di Kabupaten Luwu Timur :

#### **a. Potensi Perikanan Budidaya**

Perikanan budidaya merupakan salah satu potensi investasi yang sangat potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Luwu Timur. Hal ini didukung dengan potensi lahan yang layak untuk budidaya sangat luas. Tingkat pemanfaatan lahan untuk pengembangan komoditi perikanan budidaya sampai dengan saat ini belum mencapai 30% dari potensi lahan yang dapat dikembangkan sehingga target produksi yang dicapai pun masih sangat rendah dari potensi produksi yang dapat dicapai.

Adapun potensi perikanan budidaya Kabupaten Luwu Timur secara umum meliputi :

#### **✚ Potensi Perikanan Budidaya Air Laut**

Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi kawasan budidaya laut yang cukup besar di wilayah perairan teluk Bone dengan garis pantai 117,4 km sepanjang pesisir Kec. Burau, Wotu, Angkona dan Malili. Kondisi



perairan laut yang masih alami dan tidak mengalami pencemaran merupakan salah satu faktor utama yang mendukung pengembangan potensi budidaya laut di wilayah ini. Komoditi unggulan yang dapat dikembangkan antara lain :

### **1) Komoditi Teripang dan Lobster**

Teripang dan Lobster sebagai salah satu komoditi ekspor di Kabupaten Luwu Timur belum dikelola dengan baik oleh para nelayan karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai teknik penangkapan maupun budidaya Lobster Laut. Untuk menjaga kelestarian ekosistem teripang dan lobster di Bumi Batara Guru dari aktivitas penangkapan secara besar-besaran dan tidak bertanggungjawab.



### **2) Komoditi Rumput Laut *Euchema Cottonii***

Budidaya rumput laut *Euchema Cottonii* merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Luwu Timur yang dibudidayakan di kawasan perairan Teluk Bone sepanjang pantai pesisir Kabupaten Luwu Timur khususnya di perairan Kec. Burau sampai pantai Wotu. Luas Lahan untuk pengembangan rumput laut *euchema cottonii* di Bumi Batara guru mencapai **2.620 Ha** dengan kisaran produksi **13.338 ton kering per tahun** dengan asumsi produktivitas rata-rata **15.000 kg/Ha**.



### ✚ **Potensi Perikanan Budidaya Air Payau**

Produksi perikanan budidaya air payau atau tambak di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini didukung dengan ketersediaan lahan tambak untuk budidaya yang cukup luas mencapai 13.832 Ha.

#### 1) **Komoditi Rumput Laut *Gracillaria* sp**

Komoditi rumput laut *Gracillaria* sp merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Luwu Timur yang telah berhasil dikembangkan dan dibudidayakan. Potensi pengembangan rumput laut *Gracillaria* sp di Bumi Batara Guru didukung dengan ketersediaan lahan yang layak untuk budidaya seluas **13.832 Ha** dengan kisaran produksi mencapai **65.000 ton kering per tahun** dengan asumsi produktivitas rata-rata **60.000 kg/Ha**.



#### 2) **Komoditi Ikan Bandeng**

Ikan Bandeng merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Luwu Timur yang saat ini menempati peringkat terbaik di Provinsi Sulawesi Selatan. Komoditi ini dibudidayakan pada 4 (empat)

wilayah kecamatan pesisir untuk memenuhi kebutuhan domestik dan daerah lainnya baik di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Potensi pengembangan ikan bandeng di Bumi Batara Guru didukung dengan ketersediaan lahan yang layak untuk budidaya seluas **10.841 Ha** dengan kisaran produksi mencapai **16.000 ton per tahun** pada tingkat produktivitas rata-rata **1.500 kg/Ha**.



### 3) Komoditi Udang Windu/Vanamae

Udang merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Luwu Timur yang dibudidayakan oleh masyarakat dengan potensi usaha yang cukup baik serta segmentasi pasar yang sangat tinggi. Secara umum jenis udang yang paling banyak dikembangkan oleh para pembudidaya adalah udang windu dan udang vanamae. Terdapat juga udang laci-laci dan udang galah. Luas lahan untuk pengembangan budidaya udang di Bumi Batara Guru mencapai **13.832 Ha** dengan kisaran produksi sebesar **8.130 ton/tahun** pada tingkat produktivitas **750 kg/Ha**.

Produksi ini akan terus meningkat seiring dengan semakin tingginya permintaan terhadap komoditi ini dengan segmen pasar ekspor dan nilai jual yang sangat tinggi. Peningkatan metode/teknik budidaya, penerapan teknologi tepat guna, perbaikan tambak dan rehabilitas irigasi tambak

akan mendukung pengembangan budidaya udang yang lebih baik. Salah satu metode yang dapat diterapkan antara lain metode budidaya udang intensif dan super intensif dengan produktivitas dapat mencapai **25.000 kg/ha**



### **Budidaya Air Tawar**

Potensi pengembangan perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Luwu Timur secara umum dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan. Hal ini didukung dengan ketersediaan air yang melimpah dan layak bersumber dari sungai, irigasi dan danau. Potensi lahan perikanan budidaya air tawar di Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

#### **1) Kolam Air Tawar**

Budidaya ikan dengan kolam air tawar merupakan salah satu metode budidaya yang telah lama dilaksanakan oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur di seluruh kecamatan. Komoditi ikan yang umum dikembangkan adalah ikan lele, ikan mas, ikan nila, ikan gurami dan ikan bawal yang dibudidayakan untuk menyuplai kebutuhan domestik maupun kebutuhan luar daerah.



## 2) Sawah Mina Padi

Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu sentra produksi padi di Sulawesi Selatan dengan lahan sawah yang luas ditunjang sarana irigasi yang memadai dan tidak pernah kering sepanjang tahun. Hal ini merupakan salah satu potensi yang besar dalam mengembangkan komoditi perikanan budidaya dengan metode mina padi.

Potensi lahan pengembangan budidaya ikan dengan sistem mina padi di Kabupaten Luwu Timur mencapai **2.000 Ha** dengan produktivitas berkisar **1.000 kg/Ha** sehingga total produksi mencapai **2.000 ton per tahun.**



### b. Potensi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Luwu Timur cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam dan luar daerah. Adapun potensi perikanan tangkap yang dominan berasal dari jenis ikan pelagis kecil seperti tembang, teri, kembung, dll. Lokasi perikanan tangkap tersebar di 4 (empat) kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Malili, Angkona, Wotu dan Burau. Komoditas yang dihasilkan dari aktifitas penangkapan antara lain cakalang, tuna, tenggiri, layang, kembung, kerapu, cucut, teri, kepiting, kakap, bawal, baronang dan jenis ikan lainnya yang setiap musim dapat menghasilkan produksi yang cukup tinggi. Data Perikanan Tangkap Tahun 2019 menunjukkan :



- 1) Jumlah RTP Nelayan 1.012 RTP
- 2) Jumlah alat tangkap terdiri dari jaring insang, pukat tarik/pukat pantai, pancing, bagang apung, purse seine dan rawai dasar.
- 3) Jenis Ikan yang tertangkap :
  - Pelagis besar : tongkol, tuna, cakalang, dan tenggiri
  - Pelagis kecil : layang, kembung, teri, dan belanak
  - Demersal : cucut, kerapu, kakap, bawal dan baronang
- 4) Armada :
  - Perahu tanpa motor : 147 unit
  - Perahu bermotor : 784 unit
  - Kapal Motor : 51 unit



### **3. Gambaran Umum Dinas Perikanan**

Susunan Organisasi Dinas Perikanan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor : 83 Tahun 2021, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat yang didukung oleh dua sub bagian yaitu :
  - Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



- c. Bidang Perikanan Budidaya yang didukung oleh Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Perikanan Tangkap didukung oleh Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan didukung oleh Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur hingga akhir tahun anggaran 2022 sebanyak 24 orang Pegawai Negeri Sipil terdiri dari :

- a. Pejabat Struktural berjumlah 8 Orang dengan rincian :
  - Eselon II : 1 orang
  - Eselon III : 4 orang
  - Eselon IV : 3 orang
- b. Staf berjumlah 10 orang Dengan rincian :
  - Golongan IV : 1 Orang
  - Golongan III : 6 Orang
  - Golongan II : 3 Orang
- c. Fungsional berjumlah 6 Orang Dengan rincian :

*Gambar 1.1.  
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan*



#### **I.4 PERAN ORGANISASI**

Tugas Pokok Dinas Perikanan secara umum berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 83 Tahun 2021 yakni membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Tangkap;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perikanan Budidaya;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan;
- d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

#### **I.5 ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis yang berkembang dalam pelaksanaan pembangunan Perikanan selama ini juga banyak dipengaruhi oleh globalisasi baik dari aspek ekonomi global maupun isu dunia tentang lingkungan, maka dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

- a. Permintaan pasar dunia akan komoditi perikanan lebih diutamakan dari komoditi budidaya, hal ini berkaitan dengan aspek lingkungan sumberdaya.
- b. Komoditi hasil perikanan tangkap sangat ketat terutama dari cara/metode, teknik dan alat yang digunakan, hal ini dipantau oleh Uni Eropa.



- c. Menurunnya kualitas sumberdaya Perikanan sebagai akibat dari *illegal fishing* dan meningkatnya kebutuhan penduduk akan lahan hunian dan lahan usaha.
- d. Sarana dan prasarana budidaya khususnya budidaya air payau dan laut relatif masih terbatas demikian juga dengan usaha penangkapan ikan, sehingga produksi dan produktifitas masih terbatas.
- e. Pasca panen hasil perikanan belum dikelola secara optimal.
- f. Belum adanya penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, sehingga masih terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang antara pembangunan ekonomi atau manufactur dengan pembangunan Perikanan.

Tantangan utama pembangunan sektor Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah: Mewujudkan Target kinerja RPJMD 2021-2026 sebagaimana tertuang dalam Rensta Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dan Kegiatan Prioritas (KP 1) yaitu :

- a. Pemberian Benih unggul serta sarana dan penunjangnya
  - Jumlah benih unggul serta sarana pembudidaya ikan yang tersedia 100 Kelompok;
  - Jumlah jembatan tambak yang dibangun 15 Unit; dan
  - Jumlah jalan produksi tambak yang dibangun 20 Km.
- b. Pemberian sarana dan prasarana alat tangkap bagi nelayan (75 Kelompok)
- c. Pemberian bantuan peralatan pengolahan perikanan (25 Kelompok)



## 2

## BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

## II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis adalah suatu langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan aktual/kekinian dari masyarakat sasarnya yang diselaraskan dengan visi dan misi organisasi serta mempertahankan faktor kekuatan, tantangan, hambatan, serta peluang yang membentang di depan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Perikanan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Rencana strategis tersebut dimaksudkan untuk membangun proses perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur

**1. Visi dan Misi**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran perencanaan tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Adapun **Visi** Dinas Perikanan sejalan dengan Visi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 yaitu **Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama Dan Budaya.**



## 2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan strategis merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang menggambarkan arah strategik organisasi untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memperhatikan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pembagian misi.

Tabel 2.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan jumlah armada/ kapal penangkap ikan;</li> <li>2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perikanan tangkap;</li> <li>3. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan nelayan;</li> <li>4. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan;</li> <li>5. Pembinaan nelayan, petani ikan dan pengusaha perikanan;</li> <li>6. Konservasi terumbu karang di wilayah pesisir Kab. Luwu Timur;</li> <li>7. Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan</li> <li>8. Pembinaan SPDN</li> </ol>



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1. Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana Balai Benih Ikan (BBI); 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana budidaya perikanan; 3. Peningkatan akses pembudidaya ikan terhadap bantuan permodalan 4. Peningkatan akses informasi dan teknologi perikanan; 5. Penyediaan data kelautan dan perikanan; dan 6. Pengembangan budidaya percontohan air tawar dan air payau.
			3. Optimalisasi Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta perbaikan mutu dan daya saing produk perikanan	1. Peningkatan sarana prasarana unit pengolahan ikan (UPI); 2. Peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha perikanan; 3. Peningkatan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; 4. Peningkatan dan penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan 5. Peningkatan strategi pemasaran terhadap produk



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
				olahan hasil perikanan
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan kinerja perangkat daerah dan kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Pengelolaan dan penataan administrasi sesuai aturan serta perencanaan yang SMART

### 3. Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022 (IKU RPJMD)

Indikator kinerja daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan Tahun 2022 diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.  
Indikator Kinerja Daerah (IKU RPMJD) yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	Penjelasan Perhitungan	Satuan	Target 2022
1	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas Dasar Harga Konstan Menurut lapangan usaha	Rupiah	655,256
2	Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Tangkap ditambah Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	325,730

## II.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Luwu Timur kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan target indikator kinerja. Dengan perjanjian kinerja ini diharapkan terwujud komitmen antara pemberi amanah (Bupati) dengan penerima amanah (Kepala Dinas) dan kesepakatan antara pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.



Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

Tabel 2.3.  
Perjanjian Kerja Eselon II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan	655.256 Rupiah
		Produksi Perikanan	325.730 Ton
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip	71
		Rata-Rata Capaian Program	90 Persen

Tabel 2.4.  
Perjanjian Kerja Eselon III Sekretaris

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen
		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100 Persen
		Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 Persen
		Persentase Barang Milik Daerah yang Diadministrasi sesuai standar	100 Persen
		Persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan pendapatan perangkat daerah	100 Persen
		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen
		Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum	100 Persen



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		perangkat daerah	
		Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi	100 Persen

Tabel 2.5.  
Perjanjian Kerja Eselon III Bidang Perikanan Tangkap

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	10.165 Ton
II	Meningkatnya peran serta masyarakat pesisir dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku	94 Persen
III	Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan	Cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap	100 Persen
IV	Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil	Cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan	100 Persen
V	Tersedianya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar	57 Persen
VI	Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Cakupan masyarakat/kelembagaan masyarakat pengawas yang aktif	100 Persen



Tabel 2.6.  
Perjanjian Kerja Eselon III Bidang Perikanan Budidaya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	315.565 Ton
II	Terpenuhinya pemberdayaan kepada seluruh Pembudidaya ikan Kecil	Persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses Iptek dan informasi dan penguatan kelembagaan	90 Persen
III	Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan	100 Persen

Tabel 2.7.  
Perjanjian Kerja Eselon III Bidang Diversifikasi Hasil Perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Produksi hasil pengolahan ikan	Produksi hasil pengolahan ikan	322 Ton
II	Tersedianya Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP)	100 Persen
III	Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya	83 Persen
IV	Tersedianya Bahan Baku Industri Pengolahan	Persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang	55 Persen



Tabel 2.8.  
Perjanjian Kerja Eselon IV Kepala Sub Bagian  
Perencanaan dan Keuangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terwujudnya penyusunan perencanaan Dinas yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 Dokumen
II	Terwujudnya Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen
III	Terpenuhinya bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas	Jumlah Dokumen Evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dokumen
IV	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	Jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan	26 Orang
V	Terpenuhinya bahan dan menyusun laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu	18 Dokumen



Tabel 2.9.  
Perjanjian Kerja Eselon IV Kepala Sub Bagian  
Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Gedung, Bangunan Kantor Lainnya, Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin yang diadakan, dipelihara serta dibayarkan pajaknya	36 Unit
		Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	10 Rekening
II	Terpenuhinya pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	18 Jenis
		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	8 Orang
III	Terwujudnya Penatausahaan Barang Milik Daerah yang baik	Jumlah dokumen laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen
IV	Terwujudnya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang baik	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang di mutakhirkan	12 Dokumen
V	Terwujudnya pengelolaan administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasi	2.000 Surat
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	184 Kali
VI	Meningkatnya Kompetensi, disiplin, dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil	Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan tugas dan fungsi	5 Orang
		Jumlah ASN yang mengikut sosialisasi peraturan perundang-undangan.	18 Orang
		Jumlah ASN yang mengikut bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 Orang



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
VII	Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	10 Jenis
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	4 Jenis
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	48 Eksampler
		Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	160 Orang

Tabel 2.10.

*Perjanjian Kerja Eselon IV Kepala UPTD Balai Benih Ikan*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan lahan untuk pembudidaya ikan	Jumlah bibit ikan yang dihasilkan	80.000 Ekor

Program dan kegiatan Dinas Perikanan untuk tahun 2022 yang disajikan pada tabel di atas merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini. Format Rencana Kerja Tahunan (RKT) menjelaskan program dan kegiatan serta pagu anggaran yang ingin diwujudkan pada tahun 2022. Total anggaran untuk membiayai pelaksanaan RKT 2022 dijelaskan pada tabel berikut :



Tabel 2.11.  
 Anggaran Belanja Dinas Perikanan  
 Kabupaten Luwu Timur T.A. 2022

No		Jenis Anggaran Belanja	Target (Rp)
<b>1</b>		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>15.269.596.636</b>
1	01	Belanja Pegawai	2.944.540.010
1	02	Belanja Barang dan Jasa	5,594,708,906
1	05	Belanja Hibah	6,730,347,720
<b>2</b>		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2,493,522,600</b>
2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62,350,000
2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,684,804,000
2	04	Belanja Modal Jalan, jaringan, dan Irigasi	746,368,600
		<b>JUMLAH</b>	<b>17.763.119.236</b>



## 3

## BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

## III.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk mendorong terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan tingkat capaian target indikator kinerja utama sasaran strategis (IKU Renstra) yang tertuang dalam dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja dan capaian target indikator kinerja utama (IKU) RPJMD Kabupaten Luwu Timur.

Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Indikator kinerja kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai



dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan realiasi tolok ukur kinerja dengan target indikator kinerja kegiatan yang meliputi : *input*, *output*, dan *outcome*. Sedangkan pencapaian indikator program dilakukan dengan membandingkan realisasi dan target realisasi indikator program. Instrumen pengukuran kinerja yang digunakan terdiri dari :

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
2. Penetapan Kinerja (PK);
3. Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK);
4. Pengukuran Pencapaian Tolak Ukur Kinerja Kegiatan (*input*, *output* dan *outcome*); serta
- 5) Analisis Efisiensi dan Efektifitas;

### III.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2022

#### 1. Capaian Kinerja Daerah (Indikator Kinerja Utama RPJMD)

Hasil Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas Perikanan dengan Bupati Luwu Timur. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada masing-masing sasaran di peroleh nilai pencapaian kinerja. Penilaian skala yang ditetapkan sebagai parameter keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

$x \geq 85$  : Sangat Berhasil



- $70 \leq x < 85$  : Berhasil  
 $55 \leq x < 70$  : Cukup Berhasil  
 $X < 55$  : Kurang berhasil

Pengukuran tersebut menggunakan formulir pengukuran kinerja yang disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.  
Pengukuran Perjanjian Kerja Eselon II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7
I	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan ( Rupiah )	655.256	661.796,08	100,99	Sangat Berhasil
		Produksi Perikanan ( Ton )	325.730	329.212,09	101,06	Sangat Berhasil
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Lakip ( Angka )	71	71.39	100,54	Sangat Berhasil
		Rata-Rata Capaian Program ( Persen )	90	99,43	110,47	Sangat Berhasil

Secara umum Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja pada 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) sasaran utama dan 1 (satu) sasaran pendukung yang ditetapkan rata-rata capaian di atas 100 persen sehingga dapat dikatakan **Sangat Berhasil**.

Capaian kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut :

**Sasaran I : Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan**

**Indikator Kinerja 1 : Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan**

Indikator Kinerja Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dengan formulasi yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, yang sumber data



berasal dari Badan Pusat Statistik, namun data untuk tahun 2022 belum terbit, sehingga data yang digunakan adalah data capaian tahun 2021.

### 1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pencapaian Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan pada tahun 2022 melebihi dari target yang akan dicapai sebesar 100,99 persen. Perbandingan antara target dan realisasi Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan atas Dasar Harga Konstan Menurut lapangan usaha	655.256	661.796,08	100,99 %
<b>Persentase Capaian Rata - rata</b>			<b>100,99 %</b>

Berdasarkan tabel di atas pencapaian Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah produksi perikanan terutama pada komoditi rumput laut jenis *cottoni* sehingga penghasilan masyarakat meningkat.

### 1.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.

Perbandingan Capaian Kinerja

Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (Rupiah) Tahun 2019-2022

Indikator Kinerja	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan atas Dasar Harga Konstan Menurut lapangan usaha (Rupiah)	603.105,88	636.794,66	635.189,74	661.796,08



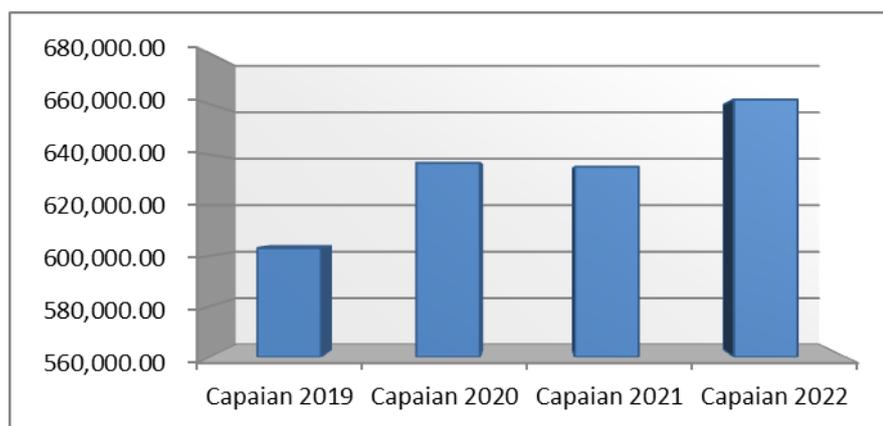


Diagram 3.1.

*Realisasi Capaian Kinerja Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (Rupiah)*

Pada tabel di atas, digambarkan capaian kinerja pada indikator 1 Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan dari tahun 2019 sampai tahun 2022 menunjukkan peningkatan meskipun di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,02. Salah satu pemicu sehingga Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan meningkat karena adanya peran serta pemerintah dengan memberikan bantuan berupa alat tangkap dan sarana alat pembantu penangkapan ikan yang disalurkan ke masyarakat nelayan kecil sehingga hasil tangkapan mereka meningkat, serta adanya perubahan pola pikir masyarakat pembudidaya bahwa kegiatan budidaya ikan akan sangat menjanjikan baik itu budidaya air payau dan air tawar.

### 1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target target jangka menengah dalam renstra digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4.

*Perbandingan antara Realisasi dengan Target Renstra Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (Rupiah) Tahun 2023-2024*

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
Nilai PDRB Sub Sektor Perikanan (Rupiah)	661.796,08	665.289	675.323



## Indikator Kinerja 2 : Produksi Perikanan

Indikator Kinerja Produksi Perikanan dengan formulasi yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah Jumlah Produksi Tangkap ditambahkan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya.

### 2.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pencapaian produksi perikanan pada tahun 2022 melebihi dari target produksi yang akan dicapai sebesar 101,06 persen. Perbandingan antara target produksi dan realisasi produksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.5.

*Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Produksi Perikanan (Ton)	325.730	329.212,09	101,06 %
<b>Persentase Capaian Rata – rata</b>			<b>101,06 %</b>

Berdasarkan tabel di atas jumlah produksi perikanan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan produksi dari segi budidaya perikanan terutama pada komoditi rumput laut jenis *cottoni* sehingga terjadi peningkatan produksi.

### 2.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6.

*Perbandingan antara Capaian Kinerja Jumlah Produksi Perikanan (Ton) Tahun 2019-2022*

Indikator Kinerja	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
Produksi Perikanan (Ton)	320.368	325.355	325.622	329.212,09



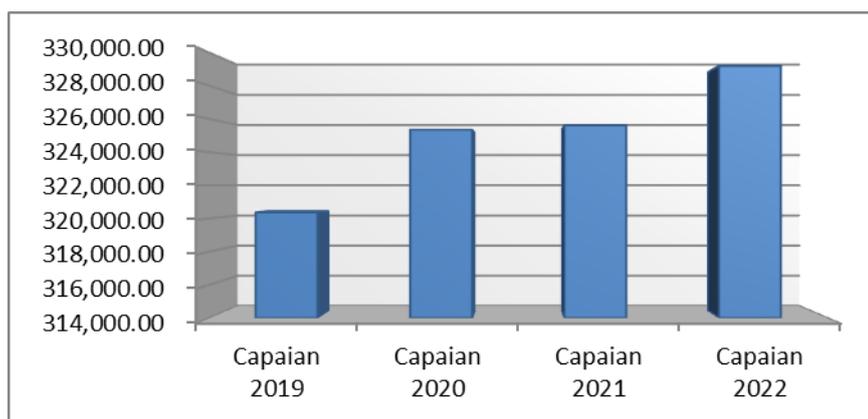


Diagram 3.2.

*Realisasi Capaian Kinerja Jumlah Produksi Perikanan (Ton)*

Pada tabel di atas, digambarkan capaian kinerja pada indikator 2 Jumlah Produksi Perikanan dari tahun 2019 sampai tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu pemicu sehingga hasil perikanan tangkap dapat meningkat karena adanya peran serta pemerintah dengan memberikan bantuan berupa alat tangkap dan sarana alat pembantu penangkapan ikan yang disalurkan ke masyarakat nelayan kecil sehingga hasil tangkapan mereka meningkat, serta adanya perubahan pola pikir masyarakat pembudidaya bahwa kegiatan budidaya ikan akan sangat menjanjikan baik itu budidaya air payau dan air tawar.

### 2.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam renstra digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7.

*Perbandingan antara Realisasi dengan Target Renstra  
Produksi Perikanan (Ton) 2023 - 2024*

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
Produksi Perikanan (Ton)	329.212,09	325.926	326.122



## 2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target provinsi dan nasional digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8.  
Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Provinsi dan Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Standar Provinsi	Standar Nasional
Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	329.212,09	1.316.708	6.660.000

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur berkontribusi sebesar 25,00 % terhadap target pencapaian produksi perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan untuk pencapaian target nasional Kabupaten Luwu Timur berkontribusi sebesar 4,94 persen.

### Sasaran II : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

#### Indikator Kinerja 3 : Nilai LAKIP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Untuk indikator kinerja Nilai LAKIP menggunakan rumus N-1 dimana yang dimasukkan adalah capaian tahun 2021. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Tim Penilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendapatkan nilai **71**.



### 3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Pencapaian antara target dan realisasi kinerja terhadap nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9  
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Lakip	71	71,39	100 %
<b>Persentase Capaian Rata – rata</b>			

### 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.10  
Perbandingan antara Capaian Kinerja  
Tahun 2018-2021

Indikator Kinerja	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021
Nilai Lakip	65,69	60,37	65,75	71,39

Pada tabel di atas, digambarkan capaian kinerja Nilai Lakip menunjukkan peningkatan. Hal ini dipicu oleh adanya kerjasama antar *stockholder* di dalam lingkup Dinas Perikanan yang berkomitmen untuk memperbaiki kinerja mereka.

### 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2021 dengan Target Renstra

Pencapaian kinerja tahun 2020-2021 dengan target renstra pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11  
Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2020-2021  
dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022
Nilai Lakip	65,75	71,39	BB



## Indikator Kinerja 4 : Rata-Rata Capaian Program

### 4.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja

Pencapaian antara target dan realisasi kinerja terhadap nilai Indikator Kinerja Rata-rata Capaian Program Dinas Perikanan Tahun 2022 pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Rata-Rata Capaian Program	90 Persen	99,43 Persen	110,47 Persen
<b>Persentase Capaian Rata – rata</b>			

Berdasarkan tabel di atas rata-rata capaian program Dinas Perikanan Tahun 2022 melampaui dari target yang ditetapkan.

### 4.2 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Tabel 3.13

Perbandingan Capaian Kinerja

Rata-Rata Capaian Program Tahun 2019-2022

Indikator Kinerja	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	Capaian 2022
Rata-Rata Capaian Program	94,31 Persen	93,38 Persen	98,78 Persen	99,43 Persen

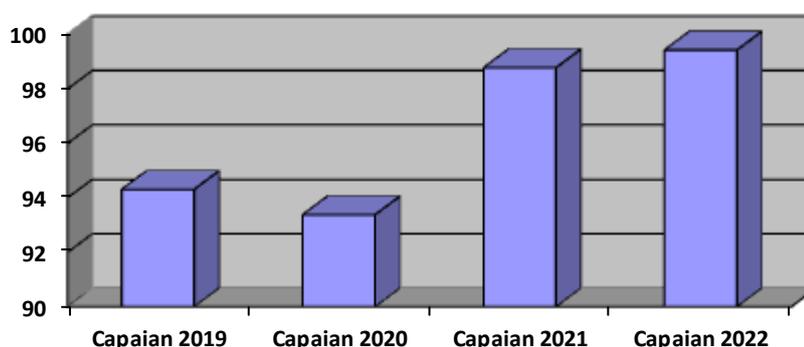


Diagram 3.3.

Realisasi Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Program



Pada tabel di atas, digambarkan capaian kinerja rata-rata capaian program menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 capaian kinerja rata-rata program diatas 90 persen. Hal ini menandakan rata-rata kegiatan terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan.

#### 4.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra

Pencapaian kinerja tahun 2022 dengan target renstra pada tahun-tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

*Tabel 3.14  
Perbandingan antara Capaian Kinerja dengan Target Renstra  
Rata-Rata Capaian Program Tahun 2023-2024*

Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target 2023	Target 2024
Rata-Rata Capaian Program	99,43 Persen	100 Persen	100 Persen

## 2. Analisa Penyebab Peningkatan dan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

### a. Faktor pendorong

Beberapa faktor pendorong tercapainya sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur antara lain adalah :

- 1) Kebijakan pelaksanaan penertiban rumpon terapung skala besar dan aktif di mulut Teluk Bone sejak tahun 2016 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang berdampak pada pola migrasi ikan yang sudah mulai normal kembali hingga ke perairan Luwu Timur.
- 2) Kesesuaian akan kebutuhan kelompok nelayan dalam hal sarana dan prasarana penangkapan ikan yang meningkatkan hasil penangkapan ikan.
- 3) Diversifikasi jenis alat tangkap yang digunakan oleh kelompok nelayan sehingga meningkatkan efektifitas



- dan produksi hasil penangkapan dan berdampak pada terjaganya kelestarian sumberdaya ikan.
- 4) Kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang mendorong peningkatan produksi hasil tangkapan dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya ikan melalui bantuan sarana prasarana penangkapan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan termasuk penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.
  - 5) Dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan pada nelayan yang mengarah pada pengetahuan penangkapan ikan yang terampil dengan dibekali pengetahuan teknik keselamatan kerja sehingga disamping mampu meningkatkan hasil tangkapan juga dapat meminimalisir kecelakaan kerja.
  - 6) Pendampingan yang dilakukan kepada kelompok nelayan yang *persuasive* sehingga faktor pembatas serta kendala yang dihadapi oleh nelayan dapat sesegera mungkin diatasi.
  - 7) Adanya pendampingan teknologi kepada kelompok tani pembudidaya (49 kelompok), sehingga terjadi transfer teknologi kepada petani pembudidaya dan mereka dapat melakukan pembudidayaan ikan dengan baik sesuai dengan standar CBIB.
  - 8) Adanya bantuan sarana budidaya ikan kepada kelompok tani (49 kelompok), seperti sarana ikan Lele, Nila, rumput laut, sehingga kelompok tani dapat meningkatkan volume usaha budidaya nya.
  - 9) Adanya pembinaan terhadap usaha perbenihan rakyat (UPR), sehingga akses pemenuhan kebutuhan benih ikan air tawar yang unggul terpenuhi.
  - 10) Adanya bantuan prasarana budidaya ikan seperti pembangunan jalan produksi (11 Km) sehingga meningkatkan kelancaran mobilitas sarana produksi dan hasil budidaya kelompok tani.



- 11) Adanya sosialisasi tentang pengendalian hama dan penyakit ikan kepada kelompok tani pembudidaya ikan (30 orang), sehingga dapat mengurangi terjadinya resiko gagal panen.
- 12) Adanya pendampingan teknologi kepada kelompok tani pengolah hasil perikanan, sehingga terjadi transfer teknologi kepada pengolah hasil perikanan agar dapat melakukan pengolahan hasil perikanan dengan baik.
- 13) Adanya pembinaan terhadap pengusaha pengolahan hasil perikanan, sehingga akses pemenuhan kebutuhan akan bahan olahan yang baik dapat terpenuhi.
- 14) Adanya sosialisasi manajemen pengelolaan usaha rumah tangga oleh Dinas terkait.

**b. Faktor Penghambat**

- 1) Masih adanya masyarakat pesisir dan nelayan yang terlibat melakukan *illegal fishing* (pemboman, pembiusan, pemberian bahan kimia, dll) yang mengancam kelestarian sumberdaya ikan.
- 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat nelayan untuk menjaga ekosistem lingkungan, sehingga masyarakat nelayan masuk golongan masyarakat yang turut serta dalam menyumbang terhadap pencemaran lingkungan pesisir dan perairan.
- 3) Kebijakan tentang status Badan Hukum bagi kelompok nelayan yang dipersyaratkan, disatu sisi sementara memantapkan kedudukan status dan ketepatan profesi nelayan, namun disisi lain semakin lama dalam pengurusan penerbitan badan hukum kelompok.
- 4) Dibatasinya kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya meningkatkan kualitas baik lingkungan maupun wilayah penangkapan ikan.
- 5) Adanya hama dan penyakit ikan yang masih sering terjadi dalam usaha budidaya.



- 6) Kurangnya kerjasama antara petani pembudidaya ikan dalam usaha pembudidayaan ikan yang berwawasan lingkungan (penanganan kualitas air dan kualitas tanah).
- 7) Adanya sarana jalan yang belum memadai, karena terhambat oleh adanya lokasi yang masih daerah hutan lindung serta adanya jalan produksi yang sudah lama dibangun dan telah mengalami kerusakan yang parah.
- 8) Ketersediaan pupuk yang masih belum mencukupi kebutuhan petani pembudidaya.
- 9) Adanya program Gubernur Sulawesi Selatan yang tidak masuk dalam program kegiatan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam RPJMD, yaitu Program Kebangkitan Udang.
- 10) Pengelohan dan pemasaran hasil perikanan yang belum optimal.
- 11) Rendahnya mutu dan daya saing produk hasil perikanan.
- 12) Pemasaran komoditi hasil perikanan.
- 13) Keterbatasan jumlah aparatur ASN di Dinas Perikanan

### **c. Alternatif Solusi**

- 1) Sosialisai dan edukasi tentang pentingnya menjaga kelestarian dari tindakan *illegal fishing* harus terus dilakukan kepada masyarakat pesisir dan nelayan.
- 2) Perlu kebijakan pelimpahan kewenangan dalam hal pengurusan pembentukan Badan Hukum untuk kelompok Nelayan, cukup dilakukan di tingkat Daerah.
- 3) Dukungan kegiatan baik fisik dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan terutama pesisir dan pantai ke arah laut yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga wilayah yang membutuhkan sarana prasarana dalam rangka kemudahan masyarakat dan Nelayan dalam beraktifitas dapat direalisasikan dengan cepat,



- sehingga dapat berimbas pada peningkatan hasil tangkapan nelayan.
- 4) Penambahan personil tenaga pendamping diperlukan dalam rangka merealisasikan program-program dan kegiatan yang telah direncanakan.
  - 5) Dukungan Pemerintah Daerah dalam hal ini penentu kebijakan dalam memberikan ruang serta kebijakan anggaran terhadap program dan kegiatan yang telah direncanakan terkhusus pada Bidang Perikanan Tangkap dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nelayan.
  - 6) Diperlukan adanya pendampingan teknologi kepada kelompok tani pembudidaya ikan secara terus menerus dan lebih intensif, sehingga terjadi transfer teknologi yang *up to date* (teknologi budidaya terkini) kepada kelompok tani pembudidaya ikan.
  - 7) Diperlukan adanya sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap pengendalian penyakit ikan serta teknik budidaya ikan berwawasan lingkungan dengan menghadirkan pakar dari lembaga riset dan/atau balai budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pengelolaan manajemen usaha pengolahan hasil perikanan serta teknik pengolahan hasil perikanan berwawasan lingkungan dengan menghadirkan pakar dari lembaga riset.
  - 8) Diperlukan peningkatan jalan produksi yang telah dibangun dengan pengerasan jalan atau pengkerikilan.
  - 9) Diperlukan penambahan kuota pupuk untuk budidaya tambak dan sosialisasi penggunaan pupuk organik kepada kelompok tani pembudidaya ikan.
  - 10) Diperlukan kegiatan percontohan budidaya udang windu.
  - 11) Diperlukan studi banding terhadap petani pembudidaya ikan ke daerah yang berhasil melakukan pembudidayaan ikan dan pengusaha pengolahan hasil



- perikanan ke daerah yang berhasil melakukan pemasaran secara modern.
- 12) Untuk mendukung program kerja Gubernur Sulawesi Selatan, diperlukan revisi RPJMD dengan memasukkan program kebangkitan udang windu atau memasukkan kegiatan percontohan budidaya udang windu setiap tahun.
  - 13) Diperlukan adanya pendampingan teknologi kepada kelompok tani pengolahan hasil perikanan berbasis kearifan lokal dan sumberdaya alam.
  - 14) Diperlukan tambahan ASN di bidang Perikanan Budidaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengembangan usaha perikanan budidaya.
  - 15) Melaksanakan program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan
  - 16) Melaksanakan pembinaan kelompok pemasaran hasil perikanan dan pelaksanaan kegiatan pameran dan ekspo produk perikanan dan pangan.

### **3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

#### **a. Sumber Daya Aparatur**

Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur di akhir tahun 2022 terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris Dinas, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, 6 (enam) orang Fungsional, 1 (satu) orang Kepala UPTD dan 10 orang staf serta 30 orang tenaga upah jasa.

#### **b. Sarana dan Peralatan Kerja Utama**

Penunjang kelancaran operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dengan sarana dan peralatan kerja. Sarana dan peralatan kerja pada Dinas Perikanan antara lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 3.15.  
Sarana dan Peralatan Kerja Utama

No	Jenis & Nama Sarana Peralatan Kerja	Jumlah /Satuan
1.	Kendaraan Roda Dua	18 Unit
2.	Kendaraan Roda Empat	1 Unit
3.	Speed Boat	1 Unit
4.	Laptop	25 Unit
5.	Komputer PC	4 Unit
6.	Balai Pertemuan	3 Unit
7.	Ppi/Tpi/Tambatan Perahu	7 Unit
8.	Radio / HT	5 Unit
9.	Spdn	1 Unit
10.	Kios PPI	1 Unit
11.	Bbi	2 Unit
13.	Gudang Rumput Laut	1 Unit
14.	Pabrik Es	2 Unit
15.	Pabrik Rumput Laut	2 Unit
16.	Bangsai Pengolahan Ikan	1 Unit
17.	Gedung Dinas/Kantor Ppi	1 Unit
18.	Kantin Koperasi	1 Unit

#### 4. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Pencapaian

Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis maka ada 5 (lima) program, 18 kegiatan dan 45 sub kegiatan yaitu :

##### a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Alokasi anggaran untuk Program Pengembangan Perikanan Tangkap di tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp5.379.089.800,00. Realisasi anggaran sebesar Rp 5.362.829.516,03 atau 99,70 persen.

Indikator program adalah Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dengan target kinerja 10.165 Ton. Terealisasi 10.267,5 Ton atau 101,01 persen.



Tabel 3.16.  
Data Jumlah Produksi Perikanan Tangkap  
(Perairan Laut dan Danau) Tahun 2022

No	Jenis Komoditi	Jumlah Produksi
1	Ikan Baronang	307,9
2	Balanak	310,8
3	Cakalang (Skj)	559,0
4	Cumi Cumi	107,7
5	Gerot-Gerot	2,0
6	Kakap Merah	26,1
7	Kakap Putih	366,8
8	Kembung/Laying	2519,6
9	Kepiting Bakau	339,8
10	Kerapu Karang	239,3
11	Kerapu Lumpur	21,6
12	Kerapu Sunu	20,9
13	Kerong2	322,4
14	Kurisi	174,2
15	Kuwe	441,8
16	Pari Kekeh	88,4
17	Peperek	320,2
18	Tembang/IPKL/Selar	2124,2
19	Tenggiri	2,7
20	Teri Nasi	749,6
21	Tongkol	936,4
22	Udang Jerbung	37,9
23	Bilih	100,6
24	Botia	0,0
25	Gabus/Lainx	13,1
26	Mas	1,1
27	Mujair	49,4
28	Nila	80,4
29	Parang	3,6
<b>Total</b>		<b>10.267,5</b>



## **✚ Kegiatan**

### **1) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan**

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp5.042.456.980. Terealisasi sebesar Rp5.030.275.828,03 atau 99,76 persen. Keluaran kegiatan ini adalah cakupan pemenuhan sarana prasarana perikanan tangkap dengan target kinerja 100 persen dan terealisasi 100 persen. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 (empat) kecamatan pesisir pantai yaitu Kec. Malili, Angkona, Wotu dan Burau serta 1 (satu) wilayah pesisir danau yaitu Kec. Towuti.

### **2) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil**

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp131.932.820. Terealisasi sebesar Rp 134.817.370 atau 98,46 persen. Keluaran kegiatan ini adalah cakupan kelompok nelayan yang diberdayakan dengan target kinerja 100 persen dan terealisasi 68,75 persen. Kegiatan ini tidak mencapai target disebabkan kurang peserta yang mengikuti pelatihan pemberdayaan yang dilaksanakan.

### **3) Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp199.700.000. Terealisasi sebesar Rp 197.736.318 atau 99,02 persen. Keluaran kegiatan ini adalah cakupan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dioperasikan sesuai dengan standar dengan target kinerja 57 persen dan terealisasi 71,42 persen.



## **Sub Kegiatan**

### **1) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan**

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp62.877.160. Terealisasi sebesar Rp 62.487.430 atau 99,38 persen. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen data dan informasi sumber daya perikanan dengan target kinerja 5 (lima) dokumen dan terealisasi 5 (lima) dokumen atau sebesar 100 persen.

### **2) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap**

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp421.200.000. Terealisasi sebesar Rp 417.152.925 atau 99,04 persen. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah tambatan perahu yang dibangun/rehab dengan target kinerja 2 (dua) unit dan terealisasi 2 (dua) unit atau sebesar 100 persen.

*Tabel 3.17.*

*Data Tambatan Perahu yang dibangun/direhab Tahun 2022*

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Alamat</b>
1	Tambatan Perahu Dusun Benteng	Desa Lampenai Kec. Wotu
2	Tambatan Perahu Desa Balo-Balo	Desa Balo-Balo Kec. Wotu

### **3) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.**

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp4.558.379.820. Terealisasi sebesar Rp 4.550.635.472,5 atau 99,83 persen. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu usaha perikanan ikan yang disediakan



dengan target kinerja 32 kelompok dan terealisasi 32 Kelompok atau sebesar 100 persen.

Tabel 3.18.  
Data Sarana Alat Tangkap dan Alat Bantu Usaha  
Perikanan Ikan yang Disediakan Tahun 2022

No	Nama	Alamat
1	Kelompok Jaya Makmur	Desa Lakawali Kec. Malili
2	Kelompok Kuda Laut	Desa Wewangriu Kec. Malili
3	Kelompok Lintas Laut	Desa Ussu Kec. Malili
4	Kelompok Semut Tongkol	Desa Bawalipu Kec. Wotu
5	Tambasua Jaya	Desa lakawali Pantai Kec. Malili
6	Kelompok Ampulidi	Desa Ranteangin Kec. Towuti
7	Kelompok Armada	Desa Pekaloea Kec. Towuti
8	Kelompok Beringin Jaya	Desa Bawalipu Kec. Wotu
9	Kelompok Bubu Jaya	Desa Lakawali Kec. Malili
10	Kelompok Harapan Jaya	Desa Lakawali Kec. Malili
11	Kelompok Kodi-Kodi	Desa Rinjani Kec. Wotu
12	Kelompok Laut Biru Sambote	Desa Bawalipu Kec. Wotu
13	Kelompok Lumba-Lumba	Desa Burau Pantai Kec. Burau
14	Kelompok Madani	Desa Lakawali Kec. Malili
15	Kelompok Minanga Oge	Desa Lampenai Kec. Wotu
16	Kelompok Mitra Tani	Desa Lakawali Kec. Malili
17	Kelompok Pemecah Ombak 2	Desa Manurung Kec. Malili
18	Kelompok Rinjani	Desa Lakawali Kec. Malili
19	Kelompok Sangkar Nelayan 2	Desa Tokalimbo Kec. Towuti



No	Nama	Alamat
20	Kelompok Sinar Laut	Desa Lauwo Kec. Burau
21	Kelompok Sipatuo	Desa Tole Kec. Towuti
22	Kelompok Sumber Rejeki	Desa Lakawali Kec. Malili
23	Kelompok Uwesintomo	Desa Lampenai Kec. Wotu
24	Kelompok Wajah Pesisir	Desa Harapan Kec. Malili
25	Kelompok Cahaya Nila	Desa Tokalimbo Kec. Towuti
26	Kelompok Lamangoa	Desa Bawalipu Kec. Wotu
27	Kelompok Lele Biu	Desa Tokalimbo Kec. Towuti
28	Kelompok Nelayan Harapan	Desa Timampu Kec. Towuti
29	Kelompok Nila Towuti	Desa Bantilang Kec. Towuti
30	Kelompok Ombak Bantilang	Desa Bantilang Kec. Towuti
31	Kelompok Tunas Bantilang	Desa Bantilang Kec. Towuti
32	Kelompok Usaha Ombak	Desa Bantilang Kec. Towuti

Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap merupakan salah satu Kegiatan Prioritas (KP 1) Bupati dimana pada tahun 2021 sampai 2022 sebanyak 54 kelompok yang telah menerima bantuan.

Tabel 3.19.

Jumlah Kelompok yang Menerima Sarana Alat Tangkap dan Alat Bantu Usaha Perikanan Tahun 2021-2022

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah sarana alat tangkap dan alat bantu usaha perikanan ikan yang disediakan	22 Kelompok	32 Kelompok

Sumber: Dinas Perikanan Tahun 2022



#### **4) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil**

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp51.620.295. Realisasi anggaran sebesar Rp51.374.795 atau 99,52 persen. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah nelayan yang dilatih teknologi penangkapan ikan dengan target kinerja 20 orang dan terealisasi 10 orang atau sebesar 50 persen. Hal ini disebabkan kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelatihan yang dilaksanakan.

#### **5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil**

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp79.512.525. Realisasi anggaran sebesar Rp78.387.375 atau 98,58 persen. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan pendampingan dengan target kinerja 12 kelompok dan terealisasi 12 kelompok atau sebesar 100 persen. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendampingi kelompok nelayan dalam pengembangan kapasitas kelompok sehingga ada peningkatan jenjang kelompok dari tingkat pemula hingga madya.

#### **6) Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, dan Kemitraan Usaha**

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp5.800.000. Realisasi anggaran sebesar Rp5.055.200 atau 87,16 persen. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah persil lahan nelayan yang disertifikatkan dengan target kinerja 80 Persil, realisasi 0 Persil atau sebesar 0 persen. Hal ini disebabkan tidak adanya penambahan kuota lahan nelayan yang disertifikatkan oleh BPN/Pemerintah



Pusat pada bulan Oktober, sehingga target kinerja tidak dapat diubah.

#### **7) Sub Kegiatan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp199.700.000. Realisasi anggaran sebesar Rp197.736.318 atau 99,02 persen. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah tambatan perahu/TPI/fasilitas pokok PPI yang dibangun/rehab dengan target kinerja 1 (satu) unit dan realisasi 1 (satu) unit atau sebesar 100 persen. Kegiatan meliputi rehabilitasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Malili Desa Wewangriu Kec. Malili.

#### **b. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

Alokasi anggaran untuk Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp 68.220.180. Realisasi anggaran sebesar Rp62.765.100 atau 92,00 persen. Indikator Program adalah Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, dengan target kinerja 94 persen dan terealisasi 94 persen atau 100 persen. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu sebagai berikut:

##### **🚩 Kegiatan**

#### **Kegiatan Pengawasan Sumber daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar sebesar Rp68.220.180. Realisasi anggaran sebesar Rp62.765.100 atau 92,00 persen. Keluaran



kegiatan ini adalah cakupan masyarakat/kelompok masyarakat pengawas yang aktif. Dengan target kinerja 100 persen dan realisasi 100 persen. Data kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.20.  
Nama Kelompok Masyarakat Pengawas yang Aktif  
Tahun 2022

No	Nama	Alamat	Jumlah Anggota
1	Bintang Timur	Malili	22 orang
2	Harapan Baru	Angkona	21 Orang
3	Lalambate	Wotu	20 Orang
4	Teluk Bone	Burau	20 Orang
5	Lampia	Harapan	16 Orang
6	Pasi-pasi	Pasi-pasi	10 Orang
7	Burau Pantai	Burau Pantai	14 Orang
8	Balo-balo	Balo-balo	30 Orang
9	Cinta Bahari	Bawalipu	33 Orang
10	PM. WTC	Manurung	19 Orang

Sumber: Dinas Perikanan Tahun 2022

#### Sub Kegiatan

##### **Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota**

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp68.220.180. Realisasi anggaran sebesar Rp62.765.100 atau 92,00 persen. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah kegiatan pengawasan terhadap usaha perikanan tangkap dengan target kinerja 24 kali dan terealisasi 24 kali atau 100 persen.

#### **c. Program Pengelolaan Budaya Perikanan**

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 7.280.826.792. Realisasi anggaran sebesar Rp 7.257.038.646,24 atau 99,67 persen. Indikator program



adalah jumlah produksi perikanan budidaya dengan target kinerja 315.565 ton dan terealisasi 318.944,59 ton atau 101,07 persen. Data jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.21  
Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Tahun 2022

No	Jenis komoditi	JumlahProduksi
1	Ikan Mas	433,5
2	Ikan Nila	276,0
3	Ikan Lele	282,0
4	Ikan Betok	0,8
5	Ikan Bawal Tawar	12,0
6	Ikan Bandeng	14.270,6
7	Ikan Mujair	240,0
8	Ikan Gurame	23,3
9	Udang Windu	552,8
10	Udang Api – Api	1.149,0
11	Udang Vaname	1.726,0
12	Kepiting	170,1
13	Rumput Laut Cattoni	145.979,0
14	Rumput Laut Gracillaria	153.829,5
	<b>Jumlah</b>	<b>318.944,59</b>

Sumber: Dinas Perikanan Tahun 2022

Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan yaitu :

#### **Kegiatan**

##### **1) Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp294.074.570. Realisasi anggaran sebesar Rp 285.603.896,50 atau 97,12 persen. Keluaran kegiatan ini adalah persentase pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan, pelatihan/penyuluhan dan



pendampingan kemitraan usaha, kemudahan akses Iptek dan informasi serta penguatan kelembagaan dengan target kinerja 90 Persen dan realisasi 100 persen.

## **2) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp6.986.752.222. Realisasi anggaran sebesar Rp 6.971.434.749,74 atau 99,78 persen. Keluaran kegiatan ini adalah cakupan sarana dan prasarana yang disediakan kepada pembudidaya ikan dengan target kinerja 100 persen dan realisasi 98,59 persen.

### **Sub Kegiatan**

#### **1) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil**

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp14.410.245. Realisasi anggaran sebesar Rp14.075.500 atau 97,68 persen. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah kelompok pembudidaya yang diberdayakan dengan target kinerja 30 kelompok dan realisasi 30 kelompok atau 100 persen.

#### **2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, dan Kemitraan Usaha**

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp34.990.445. Realisasi anggaran sebesar Rp33.179.500 atau 94,82 persen. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah persil lahan pembudidaya ikan disertifikatkan dengan target kinerja 50 dokumen dan realisasi 50 dokumen atau 100 persen.



**3) Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan**

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp244.673.880. Realisasi anggaran sebesar Rp238.348.896,50 atau 97,41 persen. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah kelompok yang mendapatkan pendampingan bantuan/APBN/APBD I, dengan target kinerja 30 kelompok dan realisasi 30 kelompok atau 100 persen.

**4) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan**

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp71.693.215. Realisasi anggaran sebesar Rp 71.454.000 atau 99,67 persen. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah dokumen data dan informasi pembudidaya ikan, dengan target kinerja 4 (empat) dokumen dan realisasi 4 (empat) dokumen atau 100 persen.

**5) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan**

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp3.208.423.409. Realisasi anggaran sebesar Rp3.203.403.206,94 atau 99,84 persen. Keluaran kegiatan ini ada tiga indikator yaitu:

- a) Jumlah prasarana di BBI yang dibangun/rehab dengan target kinerja 5 (lima) unit dan realisasi 5 (lima) unit;
- b) Jumlah jembatan tambak yang disediakan dengan target kinerja 5 (lima) unit dan realisasi 5 (lima) unit; dan
- c) Jumlah jalan produksi tambak yang dibangun dan ditingkatkan dengan target kinerja 12 Km, realisasi 11,03 Km.



Data Prasarana Pembudidaya yang dibangun tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.22  
Data Prasarana Pembudidaya yang Dibangun Tahun 2022

No	Uraian	Alamat
1	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Perikanan	Kelompok Sipatuo Desa Lakawali Kec. Malili
2	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	Kelompok UPR Lasulawai Desa Kawata Kec. Wasuponda
3	Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri	Desa Tabaroge Kec. Wotu
4	Pembangunan Jalan Produksi Tambak	Kelompok SIMBURUE Desa Manurung Kec. Malili
5	Peningkatan Jalan Produksi Tambak	Kelompok Makmur Desa Lakawali Kec. Malili
6	Peningkatan Jalan Produksi Tambak	Kelompok PAMBOL Desa Lampenai Kec. Wotu
7	Pembangunan/Rehabilitasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU)	Desa Wewangriu Kec. Malili
8	Pembangunan Jembatan Tambak	Desa Balantang Kec. Malili
9	Pembangunan Jembatan Tambak	Dusun Benteng Desa Lampenai Kec. Wotu
10	Pembangunan Jembatan Tambak	Dusun Podomoro Desa Lakawali Kec. Malili
11	Rehabilitasi Jembatan Tambak	Desa Wewangriu Kec. Malili
12	Pembangunan Jalan Produksi Tambak	Kelompok Sejahtera Desa Rinjani Kec. Wotu
13	Rehab Jembatan Tambak	Desa Lampenai Kec. Wotu
14	Peningkatan Jalan Produksi Tambak	Kelompok Tunas Bakau Desa Tampinna Kec. Angkona
15	Pembangunan Jalan Produksi Tambak	Kelompok Tani Taba Desa Wewangriu Kec. Malili
16	Lanjutan Pembangunan BBI Towuti	Desa Baruga Kec. Towuti



Pada sub kegiatan ini pembangunan dan peningkatan jalan produksi tambak merupakan salah satu Kegiatan Prioritas (KP 1) Bupati dimana pada tahun 2021 sampai 2022 jumlah jalan produksi tambak yang telah terbangun sebanyak 21,43 Km dari target 20 Km.

*Tabel 3.23.  
Panjang Jalan Produksi Tambak yang  
Dibangun/Ditingkatkan Tahun 2021-2022*

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jalan produksi tambak	10,4 Km	11,03 Km

Sumber : Dinas Perikanan Tahun 2022

Kegiatan Pembangunan Jembatan Tambak merupakan salah satu Kegiatan Prioritas (KP 1) Bupati dimana pada tahun 2021 sampai 2022 jumlah tambak yang telah terbangun sebanyak 6 (enam) unit dari target 15 unit.

*Tabel 3.24.  
Jumlah Jembatan Tambak yang Dibangun  
Tahun 2021-2022*

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jembatan Tambak yang dibangun	1 Unit	5 Unit

Sumber : Dinas Perikanan Tahun 2022

#### **6) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan.**

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp3.486.121.778. Realisasi anggaran sebesar Rp3.482.654.297,80 atau 99,90 persen. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah benih unggul serta sarana pembudidaya ikan yang tersedia, dengan target kinerja 49 kelompok dan realisasi 49 Kelompok atau sebesar 100 persen.

Data sarana pembudidaya ikan yang tersedia tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah:



Tabel 3.25.  
Jumlah Benih Unggul serta Sarana Pembudidaya  
Ikan yang Tersedia

No	Uraian	Alamat
1	Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar	Kelompok Bonti-Bonti Desa Timampu Kec.Towuti
2	Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar	Kelompok Karya Jaya Bakti Desa Mulyasari Kec. Tomoni
3	Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar	Kelompok Lele Majemuk Desa Rante Mario Kec. Tomoni
4	Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar	Kelompok Mitra Usaha Desa Beringan Jaya Kec. Tomoni
5	Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar	Kelompok Padang Puisi I Desa Bantilang Kec. Towuti
6	Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar	Kelompok Sahabat Lele Desa Jalajja Kec. Burau
7	Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar	Kelompok Segar Jaya Desa Mulyasari Kec. Tomoni
8	Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar	Kelompok Tirta Makmur Mandiri Desa Beringan Jaya Kec. Tomoni
9	Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar	Kelompok Mitra Usaha Bersama Desa Matompi Kec. Towuti
10	Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar	Kelompok Tirta Bening Desa Tawakua Kec. Angkona
11	Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar	Kelompok Bukit Ahara Desa Asuli Kec. Towuti
12	Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Air Payau	Kelompok Sumber Tani 99 Desa Atue Kec. Malili
13	Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Air Payau	Kelompok Tambak Sari Desa Manurung Kec. Malili
14	Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Air Payau	Kelompok Bandeng Raya Desa Balantang Kec. Malili
15	Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Air Payau	Kelompok Maju Jaya Desa Lakawali Kec. Malili
16	Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Air Payau	Kelompok Maminasae Desa Watangpanua Kec. Angkona
17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Sistem Polikultur	Kelompok Tambak Lestari Desa Lakawali Kec. Malili
18	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Bangkit Bersama Desa Mabonta Kec.Burau
19	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Harapan Katoni Desa Lampenai Kec.Wotu
20	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Rejeki Katonik Desa Bawalipu Kec.Wotu



No	Uraian	Alamat
21	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Sahabat Jambu-Jambu Desa Lampenai Kec.Wotu
22	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Uwe Mami Desa Bawalipu Kec.Wotu
23	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Laut Kelompok Lombu Katonik Desa Bawalipu Kec.Wotu
24	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Bina Harapan Desa Bawalipu Kec.Wotu
25	Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar	Kelompok Maju Bersama Desa Matompi Kec. Towuti
26	Pengadaan Sarana Budidaya Ikan Air Tawar	Kelompok Samaturu 2 Desa Lioka Kec. Towuti
27	Pengadaan Sarana Budidaya Polikultur (Udang dan Bandeng)	Kelompok Reso Pammase Desa Tabaroge Kec. Wotu
28	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Anugrah Laut Desa Lampenai Kec. Wotu
29	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Banua Pangka Desa Lampenai Kec. Wotu
30	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Laut Kelompok Bone Maeja Desa Bawalipu Kec.Wotu
31	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Budiman Desa Lampenai Kec. Wotu
32	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Karang Laut Desa Burau Pantai Kec. Burau
33	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Katapang Desa Mabonta Kec.Burau
34	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Katonik Sport Desa Lampenai Kec. Wotu
35	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Manurung Desa Burau Pantai Kec. Burau
36	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Pabaloi Desa Lampenai Kec. Wotu
37	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Panglawa 2 Desa Lampenai Kec. Wotu
38	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Pasir Kuning Desa Bawalipu Kec. Wotu
39	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Laut Kelompok Putra Katonik Desa Mabonta Kec.Burau
40	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Sama Rasa Desa Lampenai Kec.Wotu
41	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Sinar Katonik Desa Bawalipu
42	Pengadaan Sarana Budidaya	Kelompok Sipamase-mase



No	Uraian	Alamat
	Rumput Laut	Desa Balo-Balo Kec. Wotu
43	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Sipatuo Desa Bawalipu Kec. Wotu
44	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Tamunsou Desa Lampenai Kec. Wotu
45	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Tanjung Kuning Desa Bawalipu Kec. Wotu
46	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Tanjung Putih Desa Bawalipu Kec. Wotu
47	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Tappareng I Desa Lauwo Kec. Burau
48	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Tappareng II Desa Lauwo Kec. Burau
49	Pengadaan Sarana Budidaya Rumput Laut	Kelompok Sinar Laut Desa Burau Pantai Kec. Burau

Sub kegiatan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan merupakan salah satu Kegiatan Prioritas (KP 1) Bupati dengan indikator jumlah benih unggul yang diserahkan ke kelompok pembudidaya dimana pada tahun 2021 sampai 2022 sebanyak 73 kelompok yang telah mendapatkan bantuan ini.

Data jumlah kelompok yang telah menerima bantuan dari tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 3.26.

Jumlah Kelompok yang Menerima Sarana Produksi Budidaya Ikan/Rumput Laut Tahun 2021-2022

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Jumlah Kelompok Pembudidaya yang mendapatkan benih unggul	24 Kelompok	49 Kelompok

Sumber : Dinas Perikanan Tahun 2022

## 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp43.284.875. Realisasi anggaran sebesar Rp43.082.200 atau 99,53 persen. Keluaran kegiatan



ini adalah jumlah orang yang mendapatkan informasi hama dan penyakit ikan dengan memperhatikan kesetaraan gender (orang). Dengan target kinerja 30 orang dan terealisasi 30 orang atau 100 persen. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan penyuluhan terkait hama dan penyakit ikan yang mungkin menyerang komoditi perikanan yang dibudidayakan.

**8) Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidaya Ikan di Darat**

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp177.228.945. Realisasi anggaran sebesar Rp170.841.045 atau 96,40 persen. Keluaran kegiatan ini adalah jumlah bibit unggul yang dihasilkan. Dengan target kinerja 80.000 ekor dan terealisasi 100.000 ekor atau 125 persen. Capaian kinerja melebihi dari target, salah satu indikatornya adalah indukan ikan yang ada di BBI telah di remajakan sehingga bibit ikan yang dihasilkan bertambah dan adanya faktor alam yang menyebabkan pemijihan berjalan sesuai yang diinginkan.

**d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.**

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 1.051.234.163. Realisasi anggaran sebesar Rp 1.039.413.309 atau 98,88 persen. Indikator program adalah produksi hasil pengolahan ikan dengan target kinerja 322 ton dan terealisasi 710,57 ton atau 220 persen.

Data produksi hasil pengolahan ikan tahun 2022 dapat dilihat pada table di bawah ini :



Tabel 3.27.  
Data Produksi Hasil Pengolahan Ikan Tahun 2022

No	Jenis komoditi	Jumlah Produksi
1	Peragian/Fermentasi Ikan	4.072
2	Pengolahan Berbasis Lumatan Daging Ikan/Jelly Ikan atau Surimi	2.236
3	Penanganan Produk Segar Dingin	5.700
4	Pengasapan/Pemanggangan Ikan	2.638
5	Penggaraman/Pengeringan Ikan	686.479
6	Pengolahan Rumput Laut	5.675
7	Pengolahan lainnya	3.767
<b>Jumlah</b>		<b>710,57</b>

Program ini terdiri dari 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yaitu :

#### **Kegiatan**

##### **1) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp100.569.480. Realisasi anggaran sebesar Rp 91.127.991 atau 90,61 persen. Keluaran kegiatan ini adalah cakupan kelompok yang melakukan usaha pengelolaan hasil perikanan (RTP) dengan target kinerja 100 persen dan terealisasi 100 persen.

##### **2) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp89.923.000. Realisasi anggaran sebesar Rp 89.801.750 atau 99,87 persen. Keluaran kegiatan



ini adalah persentase kelompok usaha perikanan yang meningkat kelasnya dengan target kinerja 83 persen dan terealisasi 63,16 persen Data kelompok usaha perikanan yang dibina tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.28.  
Kelompok Usaha Perikanan yang Dibina Tahun 2022

No	Nama Kelompok	Alamat	Jenis Bantuan
1	Citra Rasa	Desa Lampenai Kec. Wotu	Sarana dan Prasarana Pengasapan Ikan
2	Kelompok Nizam Arsy	Desa Manurung Kec. Malili	Sarana dan parasarana pengolahan hasil perikanan
3	UKM Salu Borro	Desa Bawalipu Kec. Wotu	Sarana dan parasarana pengolahan kerajinan perikanan
4	UKM Muthy Andalange	Desa Wawondula Kec. Towuti	Sarana dan parasarana pengolahan kerajinan perikanan
5	UKM Melati	Desa Timampu Kec. Towuti	Sarana dan parasarana pengolahan kerajinan perikanan

### 3) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp860.741.683. Realisasi anggaran sebesar Rp 858.483.568 atau 99,74 persen. Keluaran kegiatan ini adalah persentase kelompok pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil yang berkembang, dengan target kinerja 55 persen dan terealisasi 100 persen. Data sarana dan prasarana industri perikanan yang dibangun/rehab tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah:



Tabel 3.29.  
Sarana dan Prasarana Industri Perikanan yang  
Dibangun/Rehab Tahun 2022

No	Uraian	Alamat
1	Pabrik Rumput Laut	Desa Pasi-Pasi Kec.Malili
2	Bangsai Pengolahan	Desa Wewangriu Kec. Malili
3	Pabrik Es	Desa Burau Pantai Kec. Burau.
4	Gudang Rumput laut	Desa Lakawali Pantai Kec. Malili

**Sub Kegiatan :**

**1) Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan.**

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp100.569.480. Realisasi anggaran sebesar Rp91.127.991 atau 90,61 persen. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dengan target kinerja 4 (empat) dokumen dan terealisasi 4 (empat) dokumen atau sebesar 100 persen.

**2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.**

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp89.923.000. Realisasi anggaran sebesar Rp89.801.750 atau 99,87 persen. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil, dengan target kinerja 2 (dua) kali dan terealisasi 2 (dua) kali atau sebesar 100 persen.



### 3) Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil

Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp860.741.683. Realisasi anggaran sebesar Rp858.483.568 atau 99,74 persen. Keluaran sub kegiatan ini adalah jumlah kelompok/pelaku usaha yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana pengolahan ikan skala mikro dan kecil, dengan target kinerja 4 (empat) unit dan terealisasi 4 (empat) unit. Data kegiatan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3.30.

Data Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Tahun 2022

No	Jenis Bantuan	Alamat
1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan	Kelompok Cahaya Berkah Desa Maliwowo Kec. Angkona
2	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan	Kelompok Lathifa Food Desa Lera Kec. Wotu
3	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan	Desa Wewangriu Kec. Malili
4	Pembangunan Lantai Jemur Rumput laut	Desa Lampenai Kec. Wotu

#### e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja pada program ini adalah persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran. Target yang ditetapkan sebesar 100 persen dan terealisasi 90,87 persen dengan rincian capaian :



## **✚ Kegiatan**

### **1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu. Target yang ditetapkan sebesar 100 persen dan terealisasi 100 persen.

### **2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat**

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik. Target yang ditetapkan sebesar 100 persen dan terealisasi 97,54 persen.

### **3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase barang milik daerah yang diadministrasi sesuai standar. Target yang ditetapkan sebesar 100 persen dan terealisasi 100 persen.

### **4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah. Target yang ditetapkan sebesar 100 persen dan terealisasi 23,60 persen. Hal ini disebabkan karena tidak tercapainya target PAD yang direncanakan.

### **5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah. Target yang ditetapkan sebesar 100 persen dan terealisasi 90,48 persen.



**6) Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah. Target yang ditetapkan sebesar 100 persen dan terealisasi 97,70 persen.

**7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase barang milik daerah penunjang yang terpenuhi. Target yang ditetapkan sebesar 100 persen dan terealisasi 100 persen.

**8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan. Target yang ditetapkan sebesar 100 persen dan terealisasi 125,68 persen.

**9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator kinerja pada kegiatan ini adalah persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik. Target yang ditetapkan sebesar 100 persen dan terealisasi 100 persen.

**✚ Sub Kegiatan****1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun. Target yang ditetapkan sebesar 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 (dua) dokumen atau 100 persen. Dokumen yang disusun adalah Renja Pokok dan Renja Perubahan.



**2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu. Target yang ditetapkan sebesar 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 (dua) dokumen atau 100 persen. Dokumen yang disusun adalah RKA Pokok dan RKA Perubahan.

**3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu. Target yang ditetapkan ditetapkan sebesar 2 (dua) dokumen dan terealisasi 2 (dua) dokumen atau 100 persen. Dokumen yang disusun adalah DPA Pokok dan DPA Perubahan.

**4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu. Target yang ditetapkan sebesar 10 dokumen dan terealisasi 10 dokumen, atau 100 persen. Dokumen yang disusun adalah 4 (empat) Dokumen Laporan Evaluasi Renja, 1 (satu) Dokumen LKPJ, 1 (satu) Dokumen LPPD, dan 4 (empat) Dokumen Evaluasi Lakip.

**5) Penyediaan Gaji dan Tunjangan.**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah ASN yang digaji dan tunjangan yang terbayarkan. Target yang ditetapkan sebesar 26 orang dan terealisasi 26 orang atau 100 persen.

**6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu. Target yang ditetapkan sebesar 18 dokumen dan terealisasi 18 dokumen.



Dokumen tersebut adalah dokumen laporan keuangan secara bulanan 12, dokumen secara triwulan 4 (empat) dokumen, LRA 1 (satu) dokumen, dan CALK 1 (satu) dokumen.

#### **7) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu. Target yang ditetapkan sebesar 4 (empat) dokumen dan terealisasi 4 (empat) dokumen.

#### **8) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun tepat waktu. Target yang ditetapkan sebesar 4 (empat) dokumen dan terealisasi 4 (empat) dokumen.

#### **9) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan. Target yang ditetapkan sebesar 12 dokumen dan terealisasi 12 dokumen. Dokumen yang dimaksud yaitu dokumen mutasi, naik pangkat, KGB, SKP, Satya Lencana, Pensiun dan dokumen pendukung kepegawaian lainnya.

#### **10) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan tugas dan fungsi. Target yang ditetapkan sebesar 2 (dua) orang dan terealisasi 2 (dua) orang.

#### **11) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan. Target yang



ditetapkan sebesar 2 (dua) orang dan terealisasi 1 (satu) orang.

#### **12) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Target yang ditetapkan sebesar 5 (lima) orang dan terealisasi 4 (empat) orang.

#### **13) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan. Target yang ditetapkan sebesar 10 jenis dan terealisasi 10 jenis.

#### **14) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan. Target yang ditetapkan sebesar 4 (empat) unit dan terealisasi 4 (empat) unit.

#### **15) Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah bahan logistik kantor yang disediakan. Target yang ditetapkan sebesar 10 jenis dan terealisasi 10 jenis.

#### **16) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan. Target yang ditetapkan sebesar 4 (empat) jenis dan terealisasi 4 (empat) jenis.

#### **17) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah barang bacaan dan peraturan perundang-



undangan yang disediakan. Target yang ditetapkan sebesar 48 eksemplar dan terealisasi 48 eksemplar.

### **18) Fasilitas Kunjungan Tamu**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya. Target yang ditetapkan sebesar 160 orang dan terealisasi 160 orang.

### **19) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan. Target yang ditetapkan sebesar 210 kali dan terealisasi 211 Kali.

### **20) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan. Target yang ditetapkan sebesar 1 (satu) unit dan terealisasi 1 (satu) unit.

### **21) Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan. Target yang ditetapkan sebesar 2.000 surat dan terealisasi 2.532 surat.

### **22) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan. Target yang ditetapkan sebesar 10 rekening dan terealisasi 10 rekening.

### **23) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan. Target yang ditetapkan sebesar 8 (delapan) orang dan terealisasi 8 (delapan) orang.



#### **24) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya. Target yang ditetapkan sebesar 23 unit dan terealisasi 23 unit.

#### **25) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Target yang ditetapkan sebesar 5 (lima) unit dan terealisasi 5 (lima) unit.

#### **26) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi. Target yang ditetapkan sebesar 3 (tiga) unit dan terealisasi 3 (tiga) unit.

### **III.3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2022**

#### **1. Realisasi Keuangan**

##### **a. Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan**

Tabel 3.31.

Target dan Realisasi Pendapatan Dinas Perikanan Tahun 2022

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persen</b>
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan (Sewa Gedung Rumput Laut, Sewa Pabrik Es, Sewa Pabrik Rumput Laut dan Sewa SPDN)	274.750.000	41.083.333	14.95
2	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Retribusi Penjualan Balai Benih Ikan )	100.000.000	47.360.000	47.36
	<b>Jumlah</b>	<b>364.750.000</b>	<b>88.443.333</b>	<b>23.60</b>



Berdasarkan tabel di atas jumlah pendapatan Dinas Perikanan pada tahun 2022 tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pada retribusi penyewaan tanah dan bangunan pihak ketiga yang menyewa pabrik rumput laut belum mampu menyetorkan biaya sewa sebagaimana dalam surat penetapan dikarenakan pihak penyewa mengalami kendala keuangan pada akhir tahun sebagai dampak pandemi Covid-19. Sedangkan pada sector retribusi penjualan produksi usaha daerah tidak mencapai target disebabkan pemasaran yang belum optimal serta kondisi alam yang menyebabkan banyak benih yang mati.

**b. Target dan Realisasi belanja Menurut Jenis Belanja**

Tabel 3.32.

Target dan Realisasi Belanja Dinas Perikanan

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>17.763.119.236</b>	<b>17.612.084.628,27</b>	<b>99,15</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>15.269.596.636</b>	<b>15.132.438.231,18</b>	<b>99,10</b>
	Belanja Pegawai	2.944.540.010	2.874.289.332,00	97,61
	Belanja Barang dan Jasa	5.594.708.906	5.537.518.405,25	98,98
	Belanja Hibah	6.730.347.720	6.720.630.493,93	99,86
<b>2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>2.493.522.600</b>	<b>2.479.646.397,09</b>	<b>99,44</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.350.000	61.530.000,00	98,68
	Belanja Gedung dan Bangunan	1.684.804.000	1.677.188.727,53	99,55
	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	746.368.600	740.927.669,56	99,27

Dari tabel di atas dapat diketahui anggaran belanja Dinas Perikanan pada tahun 2022 sebesar Rp



17.763.119.236. Realisasi sebesar Rp17.612.084.628,27 atau 99,15 persen yang terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja hibah) dengan total anggaran Rp15.269.596.636 dan realisasi Rp. 15.132.438.231,18 atau 99,10 persen dan belanja modal (belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, serta belanja modal jalan, irigasi dan jaringan) dengan total anggaran Rp2.493.522.600 dan realisasi Rp2.479.646.397,09 atau 99,44 persen.

Objek belanja Dinas Perikanan berupa pelaksanaan dari 7 (tujuh) program yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada awal tahun dan mengalami perubahan anggaran dalam tahun berjalan sebagaimana yang dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.33  
Realisasi Anggaran Program Berdasarkan Dokumen Perubahan

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,911,739,614	3,983,748,301	3,897,562,057	97.84%
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4,498,480,525	5,379,089,800	5,362,829,516.03	99.70%
3	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	5,539,644,245	7,280,826,792	7,257,038,646.24	99.67%
4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	74,225,430	68,220,180	62,765,100	92.00%
5	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Pangan	1,048,852,583	1,051,234,163	1,039,413,309	98.88%



## 2. Analisa Penyebab Peningkatan dan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

### a. Faktor Penyebab Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen yang kuat dari seluruh *stakeholder* untuk menfokuskan sumber-sumber daya dan dana dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam tahun 2022, juga tumbuhnya rasa percaya diri dan kemandirian bagi kelompok tani ikan dan nelayan.

### b. Faktor Penyebab Kegagalan Pencapaian Sasaran

Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan dengan seluruh *stakeholder* unit-unit yang terlibat dalam proses pencapaian kinerja dan pengambil keputusan dalam proses-proses perencanaan dan penganggaran yang kurang tepat.

### c. Hambatan/Masalah yang Dihadapi Dalam Pencapaian Sasaran

- 1) Keterbatasan jumlah aparatur yang ada di Dinas Perikanan antara lain pada tingkat staf pengelola kegiatan dan petugas teknis lapangan serta petugas statistik sehingga data dilapangan belum optimal.
- 2) Keterbatasan modal dan masih rendahnya pendapatan masyarakat nelayan sehingga tidak mampu melakukan penambahan dan perbaikan kapal.
- 3) Restrukturisasi pelaku nelayan yang tidak sejalan dengan kebutuhan akan produk perikanan, dengan alasan menjadi nelayan adalah profesi jalan terakhir atau tidak menjanjikan.
- 4) Pengeloan dan pemasaran hasil perikanan yang belum optimal.
- 5) Rendahnya mutu dan daya saing produk hasil perikanan.



**d. Strategi/Alternatif Solusi Yang Dilakukan untuk Memecahkan Masalah**

- 1) Dengan keterbatasan jumlah aparatur Bidang Perikanan Tangkap, maka alternatif solusi yang dilaksanakan adalah dengan mengoptimalkan tenaga dan sumber daya manusia yang ada pada bidang tersebut, disamping itu mengusulkan untuk penambahan tenaga pada bidang tersebut.
- 2) Restrukturisasi pelaku nelayan yang tidak sejalan dengan kebutuhan akan produk perikanan maka dilakukan beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan peningkatan keterampilan/kapasitas pelaku utama perikanan, pendampingan sertifikasi lahan nelayan, pembinaan desa pesisir dan pendampingan pada kelompok perikanan tangkap.
- 3) Melaksanakan pembinaan kelompok pemasaran hasil perikanan dan pelaksanaan kegiatan pameran dan ekspo produk perikanan.



## 4

## BAB 4 PENUTUP

## IV.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pencapaian kinerja tahunan yang diukur berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Perikanan dalam pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam LAKIP Tahun 2022 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 untuk semua sasaran strategis berikut indikator kerjanya secara umum cukup bagus. Dengan demikian, Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan kebijakan pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan telah terwujud. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kontribusi dari *stakeholder* secara keseluruhan untuk melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan yang akuntabel dan transparan

Dilihat dari sisi pencapaian akuntabilitas keuangan dalam hal ini, tingkat realisasi keuangan tahun 2022 untuk mendukung semua sasaran tercapai dengan baik, dimana tingkat realisasi belanja sebesar 99,15 persen. Dukungan keuangan/pendanaan dari APBD dan APBD Perubahan Tahun 2022 sangat membantu untuk mengoptimalkan pencapaian seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Evaluasi perbandingan pencapaian sasaran/indikator selama tahun 2021-2026 terhadap target sasaran/indikator kinerja RENSTRA selama 5 (lima) tahun (2021-2022) secara umum tercapai sangat baik dan proporsional serta diharapkan. Namun demikian terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain penetapan program dan kebutuhan prioritas yang terkadang tidak



berkesesuaian dengan kesiapan anggaran, aparatur teknis lapangan dan pengelola yang belum mencukupi, kapasitas aparatur yang belum proposional dan tidak ter *up date*, serta pemetaan potensi kelautan dan perikanan yang belum lengkap.

#### **IV.2 SARAN**

1. Melakukan perencanaan dengan memperhatikan prioritas utama program dan kebutuhan pembangunan pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan.
2. Mengusulkan penambahan aparatur untuk meningkatkan kinerja organisasi Dinas Perikanan antara lain staf pengelola kegiatan dan petugas teknis lapangan.
3. Perlu dilakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi tentang teknis dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan.
4. Perlu dilakukan pemetaan potensi kelautan dan perikanan baik secara manual maupun digital melalui metode pemetaan GIS (*Geographical Information System*) atau metode lainnya.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja. Secara spesifik, bagi Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur dapat dijadikan sebagai umpan balik dan acuan perencanaan tahun berikutnya, sebagaimana fungsi pokok dan tujuan dari penyusunan LAKIP.

Malili, 02 Januari 2023

**KEPALA DINAS**  
DINAS PERIKANAN  
**Drs. Alimuddin Nasir, M.Si**  
Pkt. Pembina Utama Muda  
Nip. 1961231 198603 1 134



**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



LAMPIRAN 1

EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PERIKAMAN KABUPATEN LUMBU TIMUR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

No	Isian RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Nilai-nilai/Kualitas/Target)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 (Rp)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Diusulkan (Rp)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Diusulkan Tahun 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD di Tahun 2022 (%)		SKPD Penanggung jawab	Ket	
				K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		URUSAN PEMERINTAH DAERAH																				
		URUSAN PEMERINTAH DAERAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																				
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	PERSENTASE RATA-RATA KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI PERANTARAN (PERSEK)	100	3.903.748.300,00	26,87	877.879.965,00	27,83	1.287.704.500,00	21,97	811.769.218,00	28,59	1.288.182.202,00	98,87	3.897.562.897,00	99,87%	97,84%	98,87	3.897.562.897,00	99,77%	99,23%	
		Kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantauan pelaksanaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu (Formasi)	100	47.423.400,00	37,50	11.203.500,00	12,50	6.888.800,00	37,50	13.234.800,00	12,50	16.728.000,00	100,00	47.333.400,00	100,00%	99,87%	100,00	47.333.400,00	100,00%	99,29%	
		Sub Kegiatan Pemantauan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang sesuai (Tabulasi)	2	20.471.150,00	1	6.709.500,00	0	6.800.000,00	1	7.800.000,00	0	8.000.000,00	2	20.464.500,00	100,00%	99,99%					Dinkes
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD yang sesuai tepat waktu (Tabulasi)	2	3.499.800,00	0	0,00	0	0,00	2	2.582.000,00	0	1.000.000,00	2	3.412.000,00	100,00%	98,00%					Dinkes
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan DP A-SKPD	jumlah dokumen DP A-SKPD yang sesuai tepat waktu (Tabulasi)	2	3.999.300,00	1	1.900.000,00	0	0,00	1	0,00	0	2.043.000,00	2	3.895.300,00	100,00%	99,81%					Dinkes
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang sesuai tepat waktu (Tabulasi)	10	95.443.470,00	4	2.713.000,00	2	0,00	2	13.213.400,00	2	14.679.800,00	10	95.443.200,00	100,00%	99,99%					Dinkes
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemantauan administrasi keuangan yang tertanggung dengan baik (Formasi)	100	2.964.822.500,00	14,59	47.440.213,90	25,43	998.887.872,00	23,77	696.842.389,00	23,77	895.447.200,00	97,54	2.915.842.671,90	97,94%	97,67%	97,54	2.915.842.671,90	97,94%	99,19%	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan (uji dan Tanggapan ASN)	jumlah ASN yang dapat dan tanggap yang terakreditasi (Formasi)	20	2.897.860,00	20	348.970,21	20	978.187,872	20	848.461,307	24	803.493,940	20	2.818.998.332,00	100,00%	97,90%					Dinkes
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Layanan Keuangan Dokumen Tercatat/Transaksi SKPD yang sesuai tepat waktu (Tabulasi)	jumlah dokumen laporan keuangan/terlaksana/umutransaksi SKPD yang sesuai tepat waktu (Tabulasi)	18	99.961.400,00	4	8.413.000,00	3	20.760.000,00	4	17.978.000,00	3	11.091.340,00	18	99.344.340,00	100,00%	99,99%					Dinkes
		Kegiatan Administrasi Barang M2B Daerah Pada Perangkat Daerah	Pemantauan BM2B yang diadministrasikan sesuai standar (Formasi)	100	34.494.900,00	25,00	1.361.000,00	25,00	7.234.000,00	25,00	4.953.200,00	25,00	38.217.900,00	100,00	34.409.000,00	100,00%	99,17%	100,00	34.409.000,00	100,00%	100,00%	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang M2B Daerah Pada SKPD	jumlah dokumen laporan pemeliharaan BM2B pada SKPD yang sesuai (Tabulasi)	4	34.494.900,00	1	1.361.000,00	1	7.234.000,00	1	4.953.200,00	1	38.217.900,00	4	34.409.000,00	100,00%	99,17%					Dinkes
		Kegiatan Administrasi Fasilitas Daerah Kawasan Perangkat Daerah	Pemantauan realisasi pendayagunaan aset berwujud perangkat daerah (Formasi)	100	4.620.245,00	8,00	813.000,00	8,00	2.708.000,00	8,00	1.906.000,00	8,00	2.708.000,00	100,00	4.595.000,00	100,00%	99,44%	100,00	4.595.000,00	100,00%	97,14%	
		Sub Kegiatan Pelayanan Pemeliharaan Rambu-rambu Daerah	jumlah dokumen laporan pemeliharaan rambu-rambu daerah yang sesuai (Tabulasi)	4	4.620.245,00	1	113.000,00	1	2.500.000,00	1	1.900.000,00	1	2.708.000,00	4	4.595.000,00	100,00%	99,44%					Dinkes
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemantauan rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah (Formasi)	100	82.678.700,00	23,81	15.428.000,00	14,29	13.788.000,00	19,85	16.997.000,00	13,33	12.275.000,00	98,48	77.792.000,00	98,98%	93,89%	98,48	77.792.000,00	98,98%	97,86%	
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Kepegawaian	jumlah laporan dan administrasi kepegawaian yang disampaikan (Tabulasi)	12	94.910.000,00	3	6.000.000,00	3	6.000.000,00	3	6.000.000,00	3	12.000.000,00	12	94.892.000,00	100,00%	99,92%					Dinkes
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berkeahlian Tinggi dan Peningkatan	jumlah ASN yang telah dapat berkeahlian tinggi dan Peningkatan (Formasi)	2	11.800.000,00	1	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	10.800.000,00	2	11.800.000,00	100,00%	100,00%					Dinkes
		Sub Kegiatan Pelatihan Peningkatan Perundang-undangan	jumlah ASN yang mengikuti pelatihan peningkatan perundang-undangan (Formasi)	2	1.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	100,00%	99,20%					Dinkes
		Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Formasi)	1	27.570.000,00	1	1.000.000,00	0	4.500.000,00	1	1.147.000,00	2	6.100.000,00	1	11.743.000,00	100,00%	78,93%					Dinkes
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemantauan rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah (Formasi)	100	401.254.270,00	23,23	108.110.000,00	19,83	104.028.000,00	19,18	93.771.000,00	19,47	140.747.000,00	98,53	401.197.000,00	99,97%	99,99%	98,53	401.197.000,00	99,97%	99,99%	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Kompleks Bangunan Lintas Pemukiman Kawasan Kota	jumlah kompleks pemeliharaan/ pemukiman kawasan kota yang dimulainya (Formasi)	10	6.822.470,00	4	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	4	2.000.000,00	10	6.800.000,00	100,00%	99,70%					Dinkes



No	Nama RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Satuan Keluaran/Output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2013 (Rincian 6-11 yang Diuraikan)		Relevansi Kinerja Peta Tronon								Relevansi Capaian Kinerja dan Anggaran Rincin 6-11 yang Diuraikan (2013)		Target Capaian Kinerja dan Anggaran Rincin 6-11 yang Diuraikan Tahun 2013		Relevansi Kinerja dan Anggaran RP/MDP di Tahun 2013		Target Capaian Kinerja dan Relevansi Anggaran RP/MDP di Tahun 2013 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Cat
						I		II		III		IV											
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		Sub Kegiatan Peningkatan Fasilitas Pemukiman, Rumah Pemukiman, dan Lingkungan Hidup	jumlah lahan seluas yang diambatkan (Paw)	81	1.876.000,00	0	371.200,00	0	4.701.000,00	0	0,00	0	0,00	0	1.876.000,00	0,00%	87,10%					Ditutup	
		Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Tempat Pemukiman Baru (TPB)	Cakupan Tempat Pemukiman Baru (TPB) yang diambatkan sesuai dengan standar (Paw)	97	199.746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,42	3.842.100,00	71,42	192.294,210,00	71,42	197.736,210,00	123,30%	99,82%	71,42	197.736,210,00	123,30%	99,82%		Ditutup
		Sub Kegiatan Pemenuhan Prasarana Pemukiman dan Pemeliharaan Tempat Pemukiman Baru (TPB)	jumlah TPB seluas per hektar TPI yang dibangun tahun (Unit)	1	199.746.000,00	0	0,00	0	0,00	0	3.842.100,00	1	192.294,210,00	1	197.736,210,00	100,00%	99,82%						Ditutup
					3.779.000.000,00											99,10%							
III		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKAMAN BERHIDAYA	PERIKAMAN BERHIDAYA (PBB)	114,563	7.290.826.712,00	77,397,36	49.422.845,00	76,226,19	136.427.508,00	82,238,83	2.122.476,700,00	68,798,08	4.928.289.718,23	218,264,79	7.277.826.046,24	101,67%	99,67%	218,264,79	7.277.826.046,24	101,67%	100,70%		
		Kegiatan Pemeliharaan Pemukiman Baru	Pemenuhan pemeliharaan dan pemeliharaan pemukiman (pemeliharaan pemukiman dan pemeliharaan pemukiman) pemukiman baru (Unit) dan pemeliharaan dan pemeliharaan pemukiman (Paw)	98	234.474.378,00	0,00	14.142.400,00	18,18	34.221.400,00	93,82	36.845.250,00		281.174.648,00	100,00	205.043.098,00	111,11%	97,12%	100,00	205.043.098,00	123,60%	121,41%		Ditutup
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pemukiman Baru	jumlah kelompok pemukiman yang dibangun (Kelompok)	10	14.416.243,00	0	745.600,00	10	0,00	20	4.401.000,00	0	8.922.000,00	30	14.416.243,00	100,00%	97,6%						Ditutup
		Sub Kegiatan Peningkatan Fasilitas Pemukiman, Pemukiman, dan Lingkungan Hidup	jumlah lahan pemukiman baru yang diambatkan (Paw)	50	14.990.647,00	0	110.000,00	0	4.150.000,00	0	1.441.750,00	50	26.872.750,00	50	13.791.500,00	100,00%	94,82%						Ditutup
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Pemukiman, Pemukiman, dan Lingkungan Hidup	jumlah kelompok yang dipelihara pemukiman pemukiman (Unit) dan pemeliharaan dan pemeliharaan pemukiman (Paw)	10	244.471.890,00	0	11.042.000,00	10	29.871.400,00	10	30.203.500,00	10	162.398.900,00	10	214.248.090,00	100,00%	97,41%						Ditutup
		Kegiatan Pengembangan Pemukiman Baru	Cakupan sarana dan prasarana yang dibangun berupa pemukiman baru (Paw)	100	6.996.792.222,00	3,75	15.659.545,00	52,43	198.297.508,00	34,99	2.116.431.721,00	33,91	4.719.135.184,00	124,97	6.971.424.749,74	124,97%	99,70%	124,97	6.971.424.749,74	124,97%	117,20%		Ditutup
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Duta dan Informasi Pemukiman Baru	jumlah dokumen data dan informasi pemukiman baru (Unit)	4	71.697.213,00	1	3.210.400,00	1	11.960.750,00	1	8.178.000,00	1	64.811.870,00	4	71.697.213,00	100,00%	99,47%						Ditutup
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Duta dan Informasi Pemukiman Baru	jumlah pemukiman di PBB yang dibangun tahun (Unit)	5	1.178.007.300,00	0	0,00	0	0,00	0	209.870.640,00	5	1.198.870.120,00	5	1.178.007.300,00	100,00%	121,17%						Ditutup
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Pemukiman Baru	jumlah pemukiman yang dibangun (Unit) (K/1)	9	488.243.600,00	0	0,00	0	18.011.744,00	0	248.084.820,00	9	430.500.991,00	9	487.230.750,00	100,00%	99,82%						Ditutup
		Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sarana Pemukiman Baru	jumlah jalan produksi tahun yang dibangun dan diambatkan (K/1) (K/1)	12	1.281.172.500,00	0	0,00	0	17.380.824,00	0	99.833.602,40	11	1.378.487.228,74	11	1.336.701.645,43	91,67%	82,50%						Ditutup
		Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sarana Pemukiman Baru	jumlah lahan yang akan pemukiman baru yang ambatkan (K/1) (K/1)	49	3.486.123.778,00	0	0,00	0	0,00	19	1.425.691.218,00	33	2.847.163.790,00	49	3.482.614.297,80	100,00%	98,36%						Ditutup
		Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas dan Lingkungan Pemukiman Baru	jumlah pemukiman yang ambatkan seluas lahan dan pemukiman baru dengan memperhatikan lingkungan pemukiman (Unit)	10	43.294.875,00	0	43.10.400,00	0	83.144.500,00	0	1.424.370,00	10	24.822.000,00	10	43.082.200,00	100,00%	99,17%						Ditutup
		Sub Kegiatan Pemenuhan Pemukiman, Pemukiman dan Pemeliharaan Lahan untuk Pemukiman Baru dan Duta	jumlah lahan yang ambatkan (Unit)	80.000	177.228.343,00	0,00	22.839.147,00	42,00	42.530.000,00	28,00	49.761.000,00	27,00	12.710.000,00	100,00	176.841.047,00	121,00%	96,40%						Ditutup
					7.290.826.712,00											99,67%	99,67%						
IV		PROGRAM PENGAWAAN SIKLUS DAUR KEKALUTAN DAN PERIKAMAN	PERIKAMAN BERHIDAYA (PBB)	94	68.228.100,00	22,00	348.000,00	22,00	5.021.700,00	20,00	14.649.700,00	22	41.838.000,00	94,00	42.745.100,00	100,00%	92,00%	94,00	42.745.100,00	100,00%	102,50%		
		Kegiatan Pengembangan Sarana Duta Pemukiman di W Berah tempat Duta, di mana, baru, dan Gerakan Air Luncur yang Dapat Diambatkan	Cakupan pemukiman/ kelompok pemukiman yang ambatkan (Unit)	100	68.228.100,00	0,23	348.000,00	27,20	5.021.700,00	45,82	14.649.700,00	0,23	41.838.000,00	100,00	42.745.100,00	100,00%	92,00%	100,00	42.745.100,00	100,00%	122,50%		

